

**Dampak Strategis Kerjasama Australian Aid Dan KPKPST Terhadap
Kualitas Hidup Perempuan di Donggala**



UNIVERSITAS
SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Lulu Mallu

4515023003

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Dampak Strategis Kerjasama Australian Aid Dan KPKPST Terhadap Kualitas Hidup Perempuan di Donggala

Lulu Mallu

4515023003

Skripsi telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi
pada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa

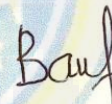
Makassar, 9 Maret 2020

Pembimbing I



Arief Wicaksono, S.IP., M.A.

Pembimbing II



Beche BT. Mamma, S.IP., M.A.

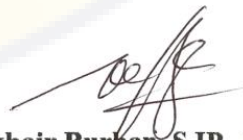
Mengetahui,

Dekan FISIP Universitas Bosowa



Arief Wicaksono, S.IP., M.A.

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa



Zulkhair Burhan, S.IP., M.A.

ABSTRAKSI

Lulu Mallu, Dampak Strategis Kerjasama Australian Aid Dan KPKPST Terhadap Kualitas Hidup Perempuan di Donggala. Di bawah bimbingan, Pembimbing I Arief Wicaksono, S.Ip., M.A. dan Pembimbing II Beche Bt. Mamma S.Ip., M.A

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerjasama Internasional Australian Aid dengan mitra local melalui program MAMPU di Donggala Sulawesi Tengah dalam mengadvokasi dan memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan fisik maupun seksual serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam mengakses layanan pemerintah dalam upaya mencapai tujuan SDGs Indonesia dan Australia terkait penurunan angka kemiskinan dan kesetaraan gender. Australian Aid merupakan salah satu Intergovernmental Organization Australia, sebagai salah satu alat diplomasi maupun perantara oleh Australia dalam berinteraksi maupun bekerjasama dengan negara lain sehingga setiap tindakan yang dilakukan terutama dalam hal pemberian bantuan kepada negara-negara berkembang dapat memberikan dampak atau pengaruh bagi kepentingan nasional serta memberikan citra baik bagi Australia dalam menjalin hubungan kerjasama internasional.

Kata kunci : *Kerjasama, SDGs,advokasi, kepentingan*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbill'alamin, segala puji bagi Allah Subhaanahu Wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat melaksanakan penyusunan skripsi. shalawat dan salam tak luput senantiasa kita panjatkan kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu 'Alayhi Wassalam agar kita diberikan syafaat-Nya pada hari pembalasan.

Adapun penulisan skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, dengan judul Dampak Strategis Kerjasama Australian Aid Dan KPKPST Terhadap Kualitas Hidup Perempuan di Donggala Sulawesi Tengah. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak mengalami kendala dan kekurangan baik dari segi pembahasan maupun penulisan yang masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan maupun kritik dari pembaca dan pendengar untuk di jadikan acuan dalam penulisan karya selanjutnya.

Pada kesempatan kali ini penulis dengan tulus ingin menyampaikan dan mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Ibu saya **Suriani**, Bapak saya **Alm.Almaidah** dan saudara laki-laki saya **Regar, Gorbi**, dan **Oki** maupun saudara perempuan saya **Eva, faradilla Mallu** dan **farma** serta om saya **Surahman** dan tante saya **Yuli Ragam** dan **Husni** yang mana mereka memberikan dukungan kepada saya baik itu sifatnya materi maupun non materi dengan penuh cinta dan rasa kasih sayang dengan tulus sehingga saya mampu sampai ketahap ini.
2. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh pallu, M.Eng** selaku rektor Universitas Bosowa.
3. Bapak **Arief Wicaksono, S.IP., M.A.** selaku **Dekan** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa beserta jajarannya.
4. Bapak **Zulhair Burhan, S.IP., M.A.** Selaku Ketua Prodi Hubungan Internasional Universitas Bosowa
5. Bapak **Arief Wicaksono, S.IP., M.A.** sebagai pembimbing I dan **Ibu Beche BT. Mamma, S.IP., M.A.** sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam menuntun, membimbing, mendukung, memberikan arahan, pengalaman, masukan maupun saran yang sangat membantu dan bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen Hubungan Internasional Universitas Bosowa Bapak **Asyari Mukrim, S.IP., MA, Fivi Elvira Basri, S.IP., MA, M.A, Rosnani S.IP., MA, Finahliyah Hasan, S.IP.,**

MA, serta Dosen Fisip yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah mengayomi dan memberikan dukungan serta memberikan informasi dan motivasi dalam kegiatan pembelajaran maupun sifatnya nonakademis selama dalam proses menuntut ilmu di Universitas Bosowa Makassar dan tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada Pak **Budi** dan Ibu **Megawati Hasan** yang telah banyak membantu dalam menangani masalah administrasi di kampus selama dalam menempuh perkuliahan.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PENERIMAAN.....	
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah.....	9
a. Batasan Masalah.....	9
b. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan & Kegunaan Penelitian.....	10
a. Tujuan Penelitian.....	10
b. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian	14
a. Tipe Penelitian.....	14
b. Jenis dan Sumber Data.....	14
c. Teknik Pengumpulan Data.....	14
d. Teknik analisa Data.....	14
F. Rancangan sistematis Pembahasan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

TELAAH PUSTAKA

A. Kerjasama Internasional.....	17
B. Intergovernmental Organization (IGO)	21
C. Bantuan Asing.....	25

BAB III GAMBARAN UMUM

HUBUNGAN INDO-AUSTRALIA di LIHAT DARI BANTUAN AUSTRALIAN AID

DALAM PROGRAM MAMPU

A. Kerjasama Internasional Indonesia-Australia	29
B. Pentingnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	34
C. Program Mampu	42

BAB IV PEMBAHASAN

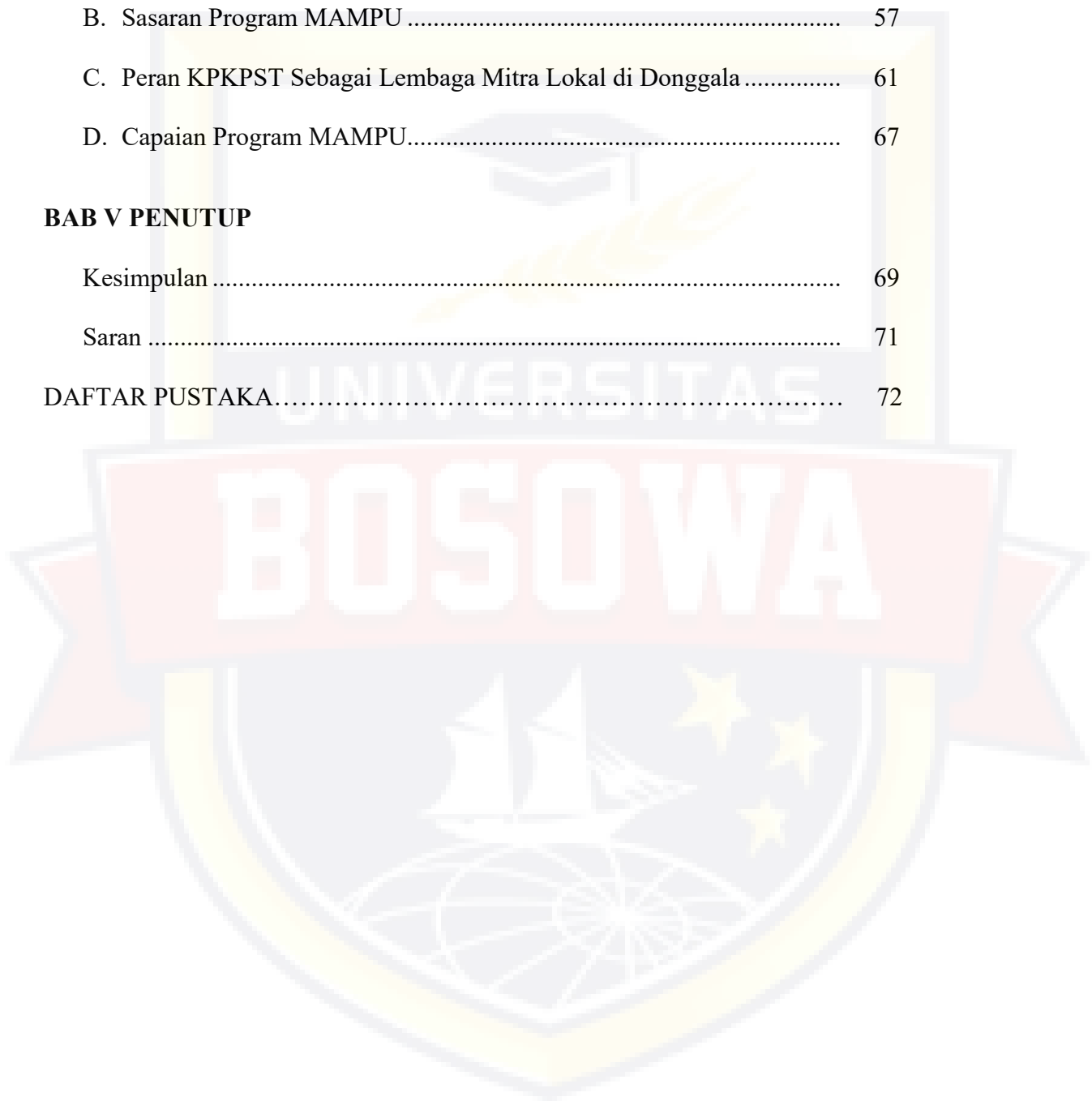
Dampak Program MAMPU Australian Aid di Donggala Sulawesi Tengah

A. Metode Program MAMPU	49
B. Sasaran Program MAMPU	57
C. Peran KPKPST Sebagai Lembaga Mitra Lokal di Donggala	61
D. Capaian Program MAMPU.....	67

BAB V PENUTUP

Kesimpulan	69
Saran	71

DAFTAR PUSTAKA.....	72
---------------------	----



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Studi Hubungan Internasional mengalami transformasi yang mulanya hanya membahas tentang hard politics (perang dan isu keamanan) kemudian berubah menjadi low politics yaitu bagaimana menciptakan rasa aman yang konsen terhadap isu-isu Ekonomi, HAM, kemiskinan, lingkungan dan Gender. Hubungan Internasional tidak hanya membahas tentang negara dan kepentingannya melainkan yang paling mendasar yaitu norma sosial (Elisabeth, 2002). Perubahan ini memberikan kesempatan bagi aktor domestik dalam melakukan hubungan ataupun kerjasama dalam lintas batas negara.

Transnasionalisme menggambarkan semakin beragamnya aktor baik lokal, nasional, ataupun internasional yang dapat membentuk jejaring secara transnasional, serta begitu banyaknya isu yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan suatu negara baik itu politik, ekonomi maupun sosial dan lain sebagainya (Peterson, 1992). Menurut Keck dan Sikkink interaksi transnasional bersifat struktural pendekatan yang bersifat tradisional yang meyakini peran penting struktur internasional dan actor centered (non negara) dimana kelompok advokasi tidak menggunakan kekuatan fisik (militer) ataupun ekonomi melainkan mengangkat isu-isu yang dapat menarik perhatian untuk dibahas oleh aktor-aktor tradisional seperti Isu lingkungan, HAM,

perempuan, kesehatan, pemberantasan kemiskinan, atau penegakkan perdamaian.

Meningkatnya organisasi internasional yang menjalin hubungan dan bekerjasama dalam lintas batas negara untuk mendorong dan melakukan perubahan sosial yang bertujuan untuk merundingkan atau merubah kebijakan, menurut Sugeng organisasi internasional merupakan bentuk kerjasama antara pihak-pihak yang bersifat internasional yang berupa perorangan, badan-badan yang bukan negara yang berada di berbagai negara maupun pemerintah negara yang berkaitan dengan kepentingan negara.

Negara-negara di dunia mencoba untuk memperkuat posisinya dengan melakukan kerjasama internasional dengan menciptakan ketergantungan satu sama lain dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya melalui sebuah perjanjian internasional yang di landasi prinsip percaya, menghargai dan menghormati satu sama lain. Adapun kerjasama yang dilakukan biasanya dari segi ekonomi, politik, pendidikan, budaya maupun keamanan internasional yang dilakukan oleh negara-negara.

Australia sendiri mencoba untuk membangun kerjasama di kawasan indo-pasifik, salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan indonesia meskipun kerjasama antar keduanya sudah terjalin sejak 1950 namun hubungan antar kedua negara tersebut juga mengalami pasang surut meskipun demikian kerjasama antara kedua negara masih terus terjalin hingga saat ini baik dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan.

Australian Aid (Australian Agency for International Development) merupakan organisasi pemerintah yang bertanggungjawab untuk mengelola bantuan luar negeri Australia yang bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang dalam upaya mengurangi kemiskinan dan mencapai pembangunan berkelanjutan di negara berkembang. Bantuan luar negeri Australian Aid sendiri memiliki berbagai bentuk kerjasama mulai dari lembaga institusi pemerintah, LSM (lembaga swadaya masyarakat) maupun organisasi internasional lainnya yang di sesuaikan dengan kebutuhan negara berkembang sebagai penerima bantuan.

Isu gender merupakan salah satu yang menjadi perhatian Australian Aid dalam memberantas ketidak setaraan gender di negara berkembang maka dari itu pihak Australian Aid sendiri memberikan bantuan luar negeri melalui program MAMPU (Empowering Indonesian women in Poverty Reduction) dimana pemerintah Australia mendukung pemberdayaan perempuan di Indonesia dengan membangun kerjasama dan bermitra dengan 13 organisasi dan lebih dari 100 mitra lokal jejaring mereka di 1000 desa di 27 dari 34 provinsi yang tersebar di pelosok Indonesia dengan mendukung dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemenuhan hak-haknya dan kesetaraan gender di Indonesia (Mampu, 2012).

Adapun tujuan Program ini yaitu untuk meningkatkan efektifitas kerjasama baik antara pihak asing, LSM lokal maupun masyarakat guna mencapai dan meningkatkan efisiensi kerjasama, dalam meningkatkan dan kekuatan LSM lokal yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan

jangkauan akses dan layanan publik, kesetaraan gender, pemberdayaan dan penghidupan bagi perempuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi perempuan Indonesia agar lebih produktif yang membantu dan meningkatkan akses perempuan terhadap perlindungan sosial pemerintah, meningkatkan akses perempuan dalam bekerja dan menghapus diskriminasi di tempat kerja, memperbaiki kondisi migrasi tenaga kerja perempuan di luar negeri, meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk kesehatan ibu dan reproduksi, memperkuat kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan dengan cara memperkuat organisasi perempuan dan organisasi yang berkepentingan terhadap isu gender serta anggota parlemen untuk mempengaruhi kebijakan (Mampu, 2012).

Australian Aid menggandeng salah satu mitra lokal yaitu KPKPST (Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah) yang dibentuk pada tahun 2002 bertujuan untuk memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak serta partisipasi perempuan dalam berbagai aspek yang selalu menanamkan keyakinan dalam mendorong perbaikan peran dan posisi perempuan. Nantinya dengan bantuan luar negeri ini diharapkan mampu menciptakan kerjasama yang bukan hanya memberikan dampak bagi negara pendonor melainkan, memberikan manfaat bagi LSM lokal maupun masyarakat sekitar terutama bagi perempuan yang mengalami tindak diskriminatif.

Melalui program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan di Sulawesi Tengah termasuk di Donggala serta meningkatkan

nilai efisiensi LSM lokal dalam memerangi ketidak setaraan gender dan kekerasan baik itu fisik maupun seksual, agar nantinya dapat mencapai tujuan-tujuan bantuan asing yang diberikan oleh pihak Australian Aid. Yohana yambise mengungkapkan bahwa ketika derajat kualitas hidup perempuan baik maka akan terhindar dari tindakan diskriminatif, kekerasan rumah tangga hingga kekerasan sosial (Purwadi, 2015). Menurut WHO sendiri kualitas hidup merupakan presepsi individu tentang posisi mereka dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka hidup, yang erat kaitannya dengan tujuan, harapan, standar dan masalah yang di hadapi yang di pengaruhi secara kompleks oleh kesehatan fisik,keadaan psikologi, hubungan sosial, serta keadaan lingkungan sekitar.

Dengan adanya standart kualitas hidup perempuan maka akan memberikan dampak peningkatan kualitas hidup bagi anak-anak dan laki-laki, beberapa penelitian menunjukkan kualitas hidup perempuan masih rendah di dibandingkan laki-laki dimana hal ini dapat dilihat dari pendapat laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan meskipun melakukan pekerjaan yang sama, menurut data Bank Dunia, perempuan Indonesia berusia 15 tahun keatas berpartisipasi dalam lingkungan kerja hanya sebesar 50,7% di tahun 2018 dibandingkan kamboja yang mencapai 81,2%, hal ini di pengaruhi adanya kontrol dan mensubordinatkan perempuan dengan beranggapan yang bertugas mencari nafkah adalah laki-laki sedangkan perempuan cenderung dirumah untuk melakukan pekerjaan rumah.

Perempuan cenderung mengalami peminggiran dari proses pembangunan dimana akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan masih cukup sulit di jangkau dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hal ini disebkan karena kurang keterwakilannya perempuan dalam parlemen yang hanya berkisar 22%, dalam UU no.2 tahun 2008 terkait kuota minimal kandidat perempuan 30% belum terpenuhi terbatasnya perempuan dalam lembaga maka akan memberikan dampak terhadap pengambilan keputusan yang terkait masalah kepentingan yang menjamin hak-hak perempuan, adanya konstruksi kultural yang memaksa perempuan menjauh dari kontestasi politik seperti perempuan dan laki-laki tidak sejajar dan itu normal, selain itu perempuan hanya dianggap sebagai sandingan oleh para suami dan tidak dianggap sebagai partner secara bersama-sama dalam membangun peradaban (sri ojarwinarlien,2002).

Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Donggala Sulawesi Tengah masih signifikan hal ini dapat dilihat dari data badan pusat statistik tahun 2015 jumlah HDI laki-laki sebesar 70,32 sedangkan perempuan hanya 64,87. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Tengah Siti Norma Mardjanu Sulawesi Tengah menjadi urutan ketiga pernikahan anak tertinggi, hal ini dapat dilihat dari data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) pada tahun 2015 dimana perkawinan anak sudah mencapai 31,9% dimana rata-rata anak berusia 15-19 tahun berstatus menikah dan sudah pernah menikah (Erna,2017).

Meningkatnya jumlah kekerasan perempuan di Sulteng tiap tahunnya juga menjadi permasalahan bagi pemerintah maupun lembaga yang konsen terhadap isu perempuan hal ini dapat dilihat dari data kasus kekerasan yang masuk dipengadilan agama (PA) sebanyak 700 kasus yang sebagian besar kasus KDRT (Redaksi, 2016). Dalam jurnal alsaker “intimate partner violence associated with low quality of life” yang menunjukkan bahwa kekerasan memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap kualitas hidup perempuan dimana perempuan tersebut merasa tersisih yang mengakibatkan rasa malu yang menganggap dia tidak pantas atau layak yang menyebabkan dia merasa sendiri dilingkungan sosial dan berubah menjadi stres yang biasanya menyebabkan percobaan bunuh diri dan melukai orang lain.

Wanita yang mengalami kekerasan fisik, mental dan seksual kualitas hidupnya lebih rendah dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami kekerasan, mereka bahkan mendapat perilaku yang tidak sepatasnya dari orang terdekat seperti pemukulan, cacian dan parahnya mereka bahkan diancaman seperti ingin menghabisi nyawa korban dan ingin membunuh orang terdekat korban yang menyebabkan korban tidak berbuat apa-apa selain menerima perilaku tersebut yang biasanya menimbulkan penyakit mental, luka, cacat bahkan kematian (Negah,2016).

Terdapat pola budaya yang masih ada dan tertanam dikalangan masyarakat yang ada di Donggala sendiri yaitu kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri terkait masalah kesetaraan gender yang masih di

anggap tabu oleh sebagian masyarakat karena adanya anggapan bahwa perempuan yang baik adalah yang mendengarkan perintah suami sebagai kepala keluarga dan mengurus segala aspek yang berkaitan dengan rumah tangganya, apa bila mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga mereka cenderung tidak melapor karena merasa “Malu” terhadap pandangan-pandangan atau stigma dari lingkungannya yang terkadang memberikan label negatif kepada perempuan yang menjadi korban dan terkadang mereka juga mempertimbangkan terkait mental dan psikis anaknya.

Terkait perempuan yang mengalami kekerasan seksual, pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan kebanyakan dari perempuan yang mengalami peristiwa tersebut cenderung tidak melapor dan menganggap bahwa hal tersebut tidak patut untuk dibahas dan cenderung di sembunyikan karena takut akan penilaian masyarakat terkait apa yang dialami dan nantinya menempatkan korban dalam kesulitan seperti merusak nama baik keluarga akibat kondisi yang dialami adanya pelabelan negatif dari masyarakat, kesulitan dalam mencari pasangan, bahkan korban dan pelaku terkadang dinikahkan.

Dengan adanya kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan di Donggala dalam meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dan menyuarakan haknya serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam melaporkan tindakan kekerasan yang dialami. Kekerasan dapat mempengaruhi kehidupan sosial seorang perempuan meskipun luka yang diderita bisa diobati namun kekerasan fisik dan mental perempuan akan terus

membekas dan dibutuhkannya penanganan yang lebih intens dalam masa pengobatan (Alsaker,2018). Kurangnya pemahaman perempuan di Donggala terkait isu gender dan masih melekatnya budaya malu dan pandangan sosial masyarakat terkait korban kekerasan, hal inilah yang coba untuk dihilangkan dengan terjalinnya kerjasama antara Australian Aid bersama KPKPST diharapkan mampu meningkatkan peran dan hubungan baik itu dari masyarakat, LSM lokal maupun Australian Aid sebagai pemberi bantuan dalam mencapai tujuan-tujuan dalam kerjasama internasional maka dari itu penulis mengangkat judul **Dampak Strategis Kerjasama Australian Aid dan KPKPST Terhadap Kualitas Hidup Perempuan di Donggala Sulawesi Tengah**

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Kerjasama internasional merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional yang tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya dimana terdapat saling ketergantungan yang harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang ikut andil didalamnya. Semakin kompleksitasnya bentuk dan pola kerjasama internasional yang ditandai dengan adanya pergeseran aktor yang bukan hanya negara (IGO) melainkan aktor non negara (INGO) juga turut andil didalamnya. Menurut sumaryo organisasi internasional merupakan sebuah proses dan menjadi salah satu perwakilan dalam proses tersebut yang diperlukan dalam rangka kerjasama untuk mencapai kesepakatan bersama.

Australian Aid sebagai international governmental organization memberikabn bantuan luar negeri melalui program MAMPU yang diharapkan dapat meningkatkan peran perempuan yang dapat mendorong pembangunan dan perekonomian perempuan di negara berkembang. Kerjasama antara Australian Aid dan KPKPST akan memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan serta meningkatkan kapabilitas dalam peningkatan kualitas hidup perempuan.

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan dan membandingkan apakah kerjasama ini memberikan dampak terkait peningkatan akses, partisipasi maupun kualitas hidup perempuan di Donggala pasca kerjasama dan data yang digunakan oleh penulis yaitu dari 2015-2019.

2. Rumusan Masalah

Apa dampak program MAMPU terhadap partisipasi perempuan dan akses perempuan kepada layanan dasar di Donggala Sulteng?

C. Tujuan & Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Memberikan informasi terkait seberapa besar kerjasama ini dapat mempengaruhi partisipasi dan akses perempuan terhadap layanan dasar di Donggala

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Mengidentifikasi dan menganalisa upaya kerjasama AUS Aid dan KPKP-ST Terhadap kualitas hidup perempuan di Donggala
- b. Untuk memberikan gambaran tentang partisipasi dan akses perempuan terhadap layanan pemerintahan dalam penyuaran hak-hak perempuan di Donggala

D. Kerangka Konseptual

Kerjasama antara Australian Aid dan KPKPST melalui program MAMPU menandakan bahwa saat ini bukan hanya negara yang menjadi aktor dalam hubungan internasional melainkan aktor-aktor non negara seperti INGO, IGO, global civil society organisation (CSOS) penegakan isu HAM, konservasi lingkungan hidup dan berkembangnya isu nonmilitar kerusakan lingkungan, kemiskinan, penyakit menular, perdagangan dan terorisme. Kerjasama Internasional sendiri adalah sebuah keharusan karena adanya akibat interdependensi dan bertambah kompleksitas manusia dalam masyarakat Internasional (koesnadi,1977).

Kerjasama Internasional hadir diakibatkan berkembangnya hubungan internasional serta berbagai aspek yang menjadi kerangka kerjasama baik berkaitan tentang masalah ekonomi, pendidikan, politik, maupun budaya. Kerjasama internasional cenderung terjadi bila terdapat kepentingan yang objektif yang terjadi dalam konteks yang berbeda yang dikibatkan karena adanya kepentingan atau terjadi masalah yang sama yang dilakukan oleh organisasi maupun lembaga internasional (Joseph,1990).

Organisasi internasional merupakan sebuah pola kerjasama yang ruanglingkupnya melampaui lintas batas negara yang berdasarkan struktur organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai yang telah di sepakati baik melalui pemerintah maupun antara non pemerintah (Rudy, 2009).

Organisasi internasional sendiri memiliki peran penting dalam proses kerjasama karena memiliki instrumen instrument yang memiliki prinsip dan tujuan maupun cara organisasi itu bekerja yang pembentukannya berdasarkan perjanjian dimana kegiatan yang dilakukan berdasarkan persetujuan dan rekomendasi dan bukan termasuk paksaan, Organisasi internasional sendiri terbagi atas dua bentuk yaitu:

1. international governmental organization (IGO) dibuat berdasarkan perjanjian internasional yang melibatkan dua atau lebih negara untuk bekerjasama dalam masalah yang menjadi kepentingan.
2. International nongovernmental organization NGO atau INGO Kegiatan administrasinya biasanya diatur berlandaskan pada hukum perdata.

Australia telah bergabung sebagai salah satu dari 200 negara yang bergabung dalam MDGS (Millenium Development Goals) sejak tahun 2000 untuk memberikan bantuan pembangunan internasional untuk negara berkembang yang bertujuan memberantas kemiskinan dan ketidak

setaraan gender, meningkatkan pendidikan dan kesehatan dan pelestarian lingkungan.

Australian Aid sebagai international governmental organization yang bertujuan mengelola bantuan luar negeri sebagai perwakilan dalam mencapai kepentingan Australia dalam melakukan kerjasama internasional baik itu sifatnya bilateral maupun multilateral di berbagai negara termasuk Indonesia salah satunya bekerjasama dengan LSM lokal di Sulawesi Tengah dalam program Mampu yang bertujuan meningkatkan peran LSM lokal dalam peningkatan partisipasi dan akses perempuan dalam ranah privat maupun publik yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memberikan perubahan terhadap pemberdayaan perempuan kearah yang lebih baik. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar terkait masalah-masalah yang dialami perempuan di Donggala mulai dari KDRT, kekerasan seksual, akses pendidikan dan membantu perempuan dalam menyuarkan hak-haknya dan meningkatkan akses perempuan.

Dalam kerjasama Internasional tidak luput dengan yang namanya bantuan asing. Bantuan asing merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh aktor internasional baik itu berupa uang, jasa, barang, atau bantuan teknis dari negara donor ke negara penerima dalam mencapai kebijakan luar negeri suatu negara. Holsti mengungkapkan bahwa bantuan asing merupakan transfer uang, teknologi, ataupun nasehat-nasehat teknis

dari negara donor ke negara penerima. Terdapat motif dalam pemberian bantuan luar negeri yaitu :

1. Motif kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu permasalahan kemiskinan di negara berkembang
2. Motif Politik untuk mempererat hubungan dengan negara lain dan meningkatkan image negara donor
3. Motif yang berkaitan kepentingan nasional negara pendonor
4. Motif keamanan nasional dengan adanya bantuan luar negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna mendorong stabilitas politik.

Dengan adanya bantuan asing ini diharapkan dapat memberikan pembangunan ekonomi jangka panjang bagi negara penerima salah satunya KPKPST dalam peningkatan kualitas hidup perempuan di Donggala yang dapat menciptakan sinergi antara, pemberi bantuan asing, LSM lokal dan masyarakat yang nantinya dapat memberikan manfaat serta dapat mencapai tujuan-tujuan dalam kerangka kerjasama internasional.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis yaitu deskripsi-analitik yang dapat menggambarkan dan membuat deskripsi analisa terkait fenomena - fenomena dalam perkembangan hubungan Internasional. Dalam hal ini dapat menggambarkan perkembangan terkait hubungan bilateral antara

Indonesia-Australia yang di tuangkan dalam sebuah program dengan menggandeng mitra lokal dalam pelaksanaannya yang nantinya diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap pemberdayaan perempuan dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Donggala.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder. Data primer adalah data yang di dapatkan dari organisasi yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan berbasis gender serta KPKPST dan data sekunder didapat dari studi literatur dan sumber resmi seperti buku, jurnal serta berita terkait dengan pembahasan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

7. Telaah pustaka dengan melakukan penelusuran literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu penelusuran terhadap beberapa buku, berita, jurnal dan internet

4. Teknik analisa Data

Teknik analisa yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif yaitu analisa yang menitik beratkan pada data atau analisa yang didapatkan dari telaah pustaka.

F. Rancangan sistematis Pembahasan

Hasil penelitian dan analisa dalam penelitian ini akan disusun dalam karya tulis ilmiah (skripsi) dengan rancangan sistematika sebagai berikut.

1. Bab I , yaitu Pendahuluan berisi latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual , metode penelitian , dan rancangan sistematis pembahasan .
2. Bab II yaitu Tinjauan Pustaka membahas terkait penelitian terdahulu terkait tentang topik,konsep dan teori yang digunakan .
3. Bab III yaitu Gambaran Umum tentang objek penelitian dalam hal ini menjelaskan kerjasama AUS Aid dan KPKP-ST dalam meminimalisir tingkat kekerasan di Donggala
4. Bab IV yaitu Pembahasan memberikan gambaran tentang partisipasi dan akses perempuan terhadap layanan pemerintahan terhadap kualitas hidup perempuan di Donggala
5. Bab V yaitu Penutup menjadi bab yang akan mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dan akan memberikan rekomendasi untuk penelitian yang sudah lakukan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional ditandai dengan makin beragamnya aktor transnasional, Setelah berakhirnya masa Perang Dingin, negara-negara mulai melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi yang ditandai dengan terbentuknya IMF (International Monetary Fund), Bank dunia dan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang melahirkan perjanjian-perjanjian internasional baik sifatnya bilateral maupun multilateral. Seiring perkembangannya lembaga internasionalpun mulai tumbuh baik skala nasional maupun internasional dan dalam mempertahankan eksistensinya di kancah internasional negara-negara di dunia mulai mencoba menggunakan soft power yang bersifat low politics mulai dari isu yang cakupannya sederhana; seperti tempat bersejarah, perlindungan hewan dan tumbuhan ekonomi; perdagangan, investasi sert isu politik yang sensitif seperti terorisme, perjanjian perdamaian, senjata nuklir dan diplomasi.

Kerjasama pada awal kemunculannya merupakan gagasan para liberalis dalam upaya mencegah terjadinya konflik dan menciptakan perdamaian, mereka optimis bahwa setiap manusia memiliki sifat baik dan tulus dalam dirinya. Kerjasama internasional merupakan kerjasama yang terjadi ketika aktor menyesuaikan perilaku mereka untuk merealisasikan atau mengantisipasi preferensi aktor lain melalui proses koordinasi kebijakan (Milner 1992). Koordinasi kebijakan ini menunjukkan bahwa negara-negara melakukan kerjasama dengan

menyesuaikan kebijakan mereka sehingga mengurangi konsekuensi negatif terhadap negara lain.

Menurut Milner terdapat dua elemen penting dalam kerjasama internasional, yang pertama dalam melakukan kerjasama para aktor diarahkan ke beberapa tujuan. Para aktor yang terlibat tidak semuanya memiliki tujuan yang sama melainkan berdasarkan pada rasionalitas. Kedua, dalam kerjasama tersebut memberikan keuntungan dan kebanggaan tersendiri bagi para aktor. Keuntungan tidak harus sama besarnya bagi tiap negara tapi mereka saling memberi keuntungan satu sama lain, para aktor mencoba untuk membantu satu sama lain dalam mencapai tujuan kebijakan mereka dalam meredam persaingan dan konflik. “Kerjasama Internasional terjadi karena ‘nation understanding’ dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan di dukung oleh kondisi internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama di antara Negara-negara namun kepentingan itu tidak identik” (Kartasmita, 1998).

Terdapat dua bentuk kerjasama yaitu :

1. Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara tertentu yang ditandai dengan perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang dibuat atau diadakan oleh dua negara yang hanya mengatur tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan kedua negara saja dalam melaksanakan kerjasama internasional.

2. Kerjasama Multilateral

Kerjasama Multilateral merupakan kerjasama antara dua negara atau lebih yang ditandai dengan adanya perjanjian multilateral yang mengatur terkait kepentingan umum negara-negara yang menyelenggarakannya dimana memberikan suatu wadah bagi negara-negara yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan untuk menghindari konflik internasional.

Terdapat beberapa cara dalam mencapai kerjasama yaitu yang pertama koordinasi dan kesepakatan, kerjasama tidak dapat terjadi tanpa adanya koordinasi atau kesepakatan di awal oleh para aktor. Yang Kedua negosiasi merupakan sebuah langkah awal yang digunakan para aktor untuk mencapai persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam memenuhi kepentingan negaranya dan yang terakhir dalam terbentuknya kerjasama yaitu koersi yang dilakukan terhadap aktor yang memiliki power besar terhadap yang lebih lemah dan memiliki tujuan untuk mencapai mutual gains, cara koersi atau pemaksaan ini merupakan bentuk nyata dari asymmetric power.

Adapun yang menjadi isu utama dalam kerjasama internasional itu sendiri yaitu terkait dengan seberapa besar keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat mendukung konsepsi dari kepentingan serta tindakan kompetitif. “Kerjasama merupakan seperangkat hubungan yang tidak didasarkan pada unsur paksaan dan kekerasan namun muncul diakibatkan karena adanya komitmen antar negara untuk mendapatkan kesejahteraan kolektif“ (Dougherty dan Pfaltzgraff, 1997: 41).

Adapun faktor yang mendukung terjadinya kerjasama internasional yaitu :

1. Axelrod mengungkapkan bahwa Payoff structure mempengaruhi tingkat kerjasama dengan mempengaruhi kecenderungan aktor untuk bekerjasama yang dimana sering bergantung pada peristiwa yang terjadi di luar kendali aktor. Payoff structure yang saling menguntungkan akan berbeda tingkat kerjasamanya dibanding dengan payoff yang menawarkan suatu pilihan yang sulit. Lebih besar konflik kepentingan antara aktor, maka akan lebih besar pula kemungkinan aktor memilih to defect dalam kerjasama. Payoff structure yang mempengaruhi mutuality of interest tidak berdasarkan pada faktor tujuan, tetapi didasarkan pada persepsi aktor atas kepentingan mereka.

Payoff structure yang menentukan kebersamaan dari hasil yang didapatkan tidak hanya didasarkan pada faktor obyektif tetapi, didasarkan pada persepsi para aktor terkait kepentingan mereka sendiri. menunjukkan bahwa konflik kepentingan diantara pemain sangat besar, maka lebih besar pula kemungkinan pemain memilih to defect atau tidak bekerja sama.

2. The Shadow of The Future adalah kekhawatiran dimasa mendatang dimana kerjasama yang terjalin pada masa sekarang akan memberikan pengaruh terhadap hubungan kedua bela pihak dimasa mendatang. Dengan kerjasama jangka panjang setidaknya dapat memberikan keuntungan lebih dibandingkan keuntungan yang sifatnya hanya sementara dimana sebuah negara menjadi konfliktual yang hanya ingin mencapai tujuannya sendiri dibandingkan tujuan bersama.

3. The Number of Actors, number of actors yaitu jumlah aktor yang berpartisipasi dalam kerjasama. Semakin banyak aktor atau negara dan kepentinganyang terlibat maka akan semakin fragile suatu kerjasama. Milner mengungkapkan kerjasama sangat dipengaruhi oleh jumlah aktor yang terlibat didalamnya semakin banyak yang ikut berperan dalam sebuah kerjasama, akan memberikan dampak positif yang signifikan dengan adanya negara-negara besar yang akan mengatur jalannya proses kebijakan dalam kerjasama antaraktor, karena negara-negara yang memiliki power yang lebih besar akan mendistribusikan pekerjaan yang menghasilkan konsekuensi bagi aktor lain. Terakhir, semakin besarnya partisipan di dalam Cooperation akan meminimalisir persaingan untuk mencapai relative gains dan juga vulnerability terhadap Cooperation itu sendiri akan terjaga.

B. Intergovernmental Organization (IGO)

Organisasi internasional merupakan salah satu bentuk kerjasama yang melampaui batas negara yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan lengkap yang diharapkan mampu melaksanakan fungsinya secara efisien dan melembaga dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama baik antara kelompok non pemerintah maupun pemerintah dengan pemerintah. Menurut Sumaryo Suryokusumo "Organisasi internasional adalah suatu proses organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan

serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul” (Malahayati 2015).

Adapun unsur-unsur yang membentuk organisasi internasional itu sendiri yaitu kerjasama yang ruang lingkungannya melintasi batas negara, mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama baik antar pemerintah maupun non pemerintah, terdapat struktur organisasi yang jelas dan lengkap, serta melaksanakan fungsi secara berkesinambungan. Cheever dan Field Haviland menggambarkan bahwa Organisasi internasional mengatur bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, yang berdasarkan persetujuan umum dalam melaksanakan fungsinya yang memberi manfaat timbal balik melalui pertemuan maupun kegiatan staf secara berkala dimana terdapat tiga unsur didalamnya yaitu keterlibatan negara dalam suatu pola kerjasama, adanya pertemuan dan terdapat staf yang bekerja sebagai pegawai sipil internasional.

Sugeng Istanto mengklasifikasikan organisasi internasional yaitu organisasi internasional privat organisasi dari non pemerintah atau orang-perorangan yang melakukan kerjasama untuk kepentingan internasional yang diselenggarakan badan-badan sejenis negara, dan organisasi internasional publik yaitu organisasi dari pemerintah negara yang melakukan kerjasama untuk kepentingan internasional yang terbagi atas global dan regional. Klasifikasi organisasi internasional digunakan untuk melihat upaya apa yang seharusnya dilakukan serta tujuan apa yang ingin dicapai dalam terbentuknya organisasi internasional, bertujuan untuk mendorong hubungan co-operative diantara anggotanya yang tidak sedang dalam konflik negara, untuk menurunkan tingkat conflict diantara negara anggota dengan

jalan management konflik atau prevention conflict Serta menciptakan/memproduksi confrontation diantara anggota yang berbeda pendapat.

Leroy Bennet memberikan gambaran terkait ciri-ciri yang dimiliki organisasi internasional yaitu :

1. Organisasi yang tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan
2. keanggotaan yang bersifat sukarela dari peserta yang memenuhi syarat
3. Instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasional
4. badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas
5. sekretariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian dan informasi secara berkelanjutan.

Meskipun negara menjadi aktor yang dominan dalam rangkaian kerjasama internasional namun organisasi internasional juga mengalami perkembangan yang pesat baik dalam bentuk serta pola kerjasamanya dimana peran organisasi internasional semakin signifikan yang tidak hanya melibatkan negara beserta pemerintah saja, namun telah diakui pula keberadaan organisasi-organisasi non pemerintah yang dalam segi jumlahnya mengalami peningkatan. Organisasi non pemerintah (NGO) menjadi mitra pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan memposisikan diri sebagai media kontrol yang memiliki posisi yang menentukan.

Australian aid merupakan organisasi internasional milik pemerintah Australia atau yang dikenal dengan IGO (Intergovernmental Organization), sebagai salah satu alat diplomasi maupun perantara oleh Australia dalam berinteraksi maupun bekerjasama dengan negara lain meskipun demikian IGO tidak dapat

menggantikan kedudukan atau wewenang atas berbagai kebijakan internal dan eksternal dari suatu negara tetapi kebijakan yang dikeluarkan Australian aid mendapatkan dan memberikan pengaruh terhadap kebijakan luar negeri Australia, sehingga setiap tindakan yang dilakukan terutama dalam hal pemberian bantuan kepada negara-negara berkembang dapat memberikan dampak atau pengaruh bagi kepentingan nasional serta memberikan citra baik bagi Australia.

Adapun beberapa fungsi organisasi internasional adalah sebagai berikut :

1. Tempat berhimpun bagi negara-negara anggota bila organisasi internasional itu inter Government Organization/IGO (antar negara atau pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila organisasi internasional itu masuk kategori Inter Non Government Organization/INGO (non pemerintah)
2. Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang memnyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional
3. Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan atau norma atau rezim-rezim internasional penyediaan saluran untuk berkomunikasi diantara sesama anggota dan adakalanya merintis akses.

Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus menjadi sarana untuk bekerjasama dan untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama. Organisasi internasional diugunakan Sebagai instrumen Oleh negara-negara anggotanya dalam mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik negaranya. Organisasi internasional

sebagai arena merupakan tempat bertemunya para aktor untuk membicarakan dan membahas isu-isu maupun kepentingan politik tidak jarang organisasi internasional digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah negaranya yang tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional dan Organisasi internasional Sebagai aktor independen yang dapat membuat keputusannya sendiri tanpa dipengaruhi oleh paksaan dari luar (Rudy, 1998).

C. Bantuan Asing

Bantuan asing digunakan oleh aktor internasional sebagai sarana dalam melakukan kerjasama sebagai salah satu pelaksanaan politik internasional. Bantuan luar negeri adalah bantuan berupa uang atau bantuan lain yang digunakan untuk membantu suatu negara dalam mempercepat pembangunan ekonomi atau sekadar memenuhi kebutuhan dasarnya (Joshua S. dan Pevehouse, 2009). Negara yang memberikan bantuan luar negeri dikenal dengan nama negara donor, sedangkan negara yang menerima bantuan luar negeri dikenal dengan nama negara resipien atau penerima. bantuan luar negeri dapat menjadi bentuk kekuasaan dimana donor berusaha untuk mempengaruhi penerima, atau dapat berupa bentuk saling ketergantungan di mana si donor dan penerima membuat pertukaran yang saling menguntungkan. Holsti mengungkapkan bahwa bantuan asing merupakan pemindahan dana, barang, atau nasehat teknis dari negara donor kenegara penerima yang merupakan sarana kebijakan yang telah digunakan dalam hubungan luar negeri selama berabad-abad.

Adapun pemberian bantuan internasional memiliki tujuan dan bentuk yang berbeda, dari tujuannya, pemberian bantuan internasional untuk memberikan

bantuan atas dasar kemanusiaan, membantu perekonomian, bahkan bertujuan politik dan terkadang bertujuan untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pendonor. Dilihat dari bentuknya, bantuan internasional bisa berupa pemberian suntikan dana, pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa dan pemberian bantuan militer maupun pemberian bantuan dalam bentuk pelaksanaan program sosial.

Terdapat beberapa kategori terkait bantuan internasional dalam pembangunan ekonomi yaitu grant, technical cooperation, credit, dan loans. Grant merupakan dana hibah yang diberikan oleh donor kepada penerima secara cuma-cuma, tanpa persyaratan apapun untuk mencapai suatu tujuan. Technical Cooperation atau kerjasama teknis merupakan bentuk bantuan hibah yang diberikan oleh donor yang bukan hanya uang atau barang melainkan berupa bantuan ahli didalam beberapa proyek pembangunan ekonomi penerima di bidang tertentu. Credit merupakan bentuk bantuan hibah yang bisa digunakan penerima untuk mencicil pembelian produk tertentu yang diproduksi oleh donor dalam jangka waktu panjang. Loans merupakan dana pinjaman yang diberikan oleh donor untuk membantu pembangunan ekonomi penerima yang harus dilunasi ke donor sesuai dengan jangka waktu pengembalian yang panjang dan dengan suku bunga yang relatif rendah.

Terdapat tiga model utama dalam pemberian bantuan internasional, yang dibedakan atas dasar bentuk bantuannya dan bukan dari lembaga donornya yaitu Oxfam Model, Handout Model, dan Disaster Relief Model. Oxfam Model adalah bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan dalam skala waktu yang lama

dimana penerima bantuan di berikan bantuan untuk mengembangkan kapasitasnya, sehingga penerima bantuan tidak lagi bergantung pada bantuan yang diberikan dimasa mendatang. Handout model merupakan bantuan yang diberikan untuk membantu suatu negara atau komunitas dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tanpa memikirkan jangka panjangnya. Disaster relief model merupakan bantuan yang diberikan kepada orang atau negara yang terkena bencana kelaparan, kekeringan, gempa bumi, banjir, maupun bencana alam lainnya seperti perang termasuk kedalam bantuan relief desaster yang penyediannya bantuannya jangka pendek dalam bentuk air, makanan, air, pakaian dan keperluan lainnya.

Adapun motif dari pemberian bantuan asing dari pendonor ke negara penerima yaitu motif kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama pembangunan ekonomi. Motif politik, untuk meningkatkan image dan pengaruh negara serta untuk mencapai kepentingan negara donor. Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan memiliki sisi ekonomi dan motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor. Bantuan asing umumnya tidak ditujukan untuk kepentingan politik jangka pendek melainkan untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka panjang, bantuan asing dimaksudkan untuk membantu menjamin beberapa tujuan politik negara donor yang tidak dapat dicapai hanya melalui diplomasi, propaganda atau kebijakan publik semata. Akan tetapi, pada umumnya negara donor

mengatasnamakan motivasi moral, kemanusiaan dan perdamaian dunia dalam melaksanakan misinya. Pada umumnya, program pemberian bantuan jelas dilakukan tidak hanya dikarenakan atas dasar kemanusiaan ataupun perdamaian dunia semata.

Dalam pemberian bantuan asing, pendonor harus memiliki izin dari penerima pemerintah untuk beroperasi di suatu negara hal ini kembali lagi pada prinsip kedaulatan nasional dimana pemerintah nasional berhak mengontrol distribusi bantuan dan kehadiran pekerja asing di suatu negara dan setiap negara harus menghormati kedaulatan tiap-tiap negara. Bantuan luar negeri seringkali dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan negara pendonor dimana negara pendonor memberikan bantuan untuk menjaga keamanan dalam negerinya dan sering juga digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan diplomatik negara pendonor, agar mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional dan untuk meningkatkan pengaruhnya di negara-negara penerima maupun untuk mempromosikan komoditas ekspor melalui program-program dalam menyebarkan bahasa, budaya, serta agama negara pendonor.

BAB III

HUBUNGAN INDO-AUSTRALIA di LIHAT DARI BANTUAN

AUSTRALIAN AID DALAM PROGRAM MAMPU

A. Kerjasama Internasional Indonesia-Australia

Dengan adanya kerjasama baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral yang telah di bangun sejak 1949 antara Australia dan Indonesia yang ditandai dengan adanya hubungan diplomatik yaitu dengan di tunjukinya Dr.Oesman Sastroamidjojo sebagai kuasa Usaha *ad interim* di Canberra dan pada 1950 digantikan oleh Oetoyo Ramelan sebagai Duta Besar Penuh.

Hubungan antara kedua negara ini sering mengalami pasang surut terkadang terlihat sangat bersahabat, kooperatif, dan saling mendukung seperti di era kepemimpinan Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Paul John Keating tahun 1992-1995, sekitar US\$ 46.7 juta bantuan yang diberikan Australia pada tsunami Aceh 2004 dan berkontribusi dalam beberapa kemitraan seperti Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA), perjanjian kerjasama keamanan akibat kejahatan transnasional melalui Lombok Treaty di tahun 2006 dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) untuk menumbuhkan ekonomi berkelanjutan dikawasan ini dengan sistem pasar dan investasi yang lebih liberal dan transparan. Namun disisi lain hubungan kedua negara tersebut juga terkadang berubah dan penuh ketegangan, saling curiga, dan kurang bersahabat seperti dimana Menteri John Howard dan Presiden B.J. Habibie terkait referendum di Timor Timur yang ditandai dengan

lepasnya Timor Leste dari RI, Bom Bali yang terjadi pada 12 oktober 2002, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Tony Abbot terkait penyadapan yang dilakukan pihak Australia dan kemudian 2015 terkait eksekusi mati dua warga Australia terpidana kasus narkoba dimana perdana menteri Australia Anthony John Abbot mengirim surat kepada pemerintahan RI dan mengungkit bantuan pada tsunami Aceh 2004.

Meskipun hubungan Indonesia dan Australia sering mengalami naik turun namun kedua negara ini memiliki hubungan bilateral yang kuat, khususnya melalui kerjasama pembangunan, politik, ekonomi, keamanan, dan pendidikan. Meskipun Indonesia dan Australia sangat berbeda dalam hal etnis atau ras, budaya, dan agama namun mereka mencoba untuk menjalin kerjasama yang kokoh dengan membangun prinsip *good-neighbourliness* dimana Australia dan Indonesia berkepentingan untuk menjaga hubungan mereka agar tetap harmonis agar tercapainya kepentingan dan kerjasama antar kedua negara dimana kedua negara ini saling menyadari bahwa potensi yang dikandung dalam hubungan mereka sangat besar bagi kepentingan nasional masing-masing dan mereka saling membutuhkan satu sama lain Australia membutuhkan Indonesia sebagai pasar dalam hal jasa, produk-produk pertanian dan peternakan, juga negara tujuan investasi bidang pertambangan, pendidikan, dan Indonesia sebagai negara yang dekat dengan Australia dalam kerjasama keamanan dan stabilitas kawasan untuk membendung aliran kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, imigran ilegal, terorisme dan kemungkinan munculnya gangguan keamanan lainnya sedangkan Indonesia membutuhkan Australia sebagai sumber modal dan bantuan ekonomi, investasi,

beasiswa serta bantuan teknis dan keuangan dalam operasi-operasi menjaga keamanan dan stabilitas kawasan, dari tindak kejahatan transnasional.

Austrlian Aid sebagai lembaga yang mengatur bantuan luar negeri Australia didirikan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan stabilitas sebagai negara ke negara program untuk negara-negara tetangga di Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Dengan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan ekonomi yang berkelanjutan Australia mempromosikan kepentingan nasional mereka melalui program bantuan.

Bergabungnya Australia dan Indonesia dalam keanggotaan MDGs (Millennium Development Goals) pada tahun 2002 yang bertujuan untuk membangun paradigma global yang berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs yang dirumuskan oleh negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan para pakar beberapa lembaga internasional dimana negara berkembang berkewajiban untuk melaksanakannya sedangkan negara maju berkewajiban mendukung dan memberikan bantuan terhadap program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait isu-isu yang mendasar terkait pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, kemiskinan, perdamaian, keamanan dan pembangunan. Pada tahun 2015 berganti menjadi SDGs (Sustainable Development Goals) yang memiliki cakupan yang lebih luas dari pada sebelumnya SDGs merupakan hasil kesepakatan 193 negara anggota PBB yang melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas yang dibuat melalui proses partisipatoris sangat inklusif dengan cara konsultasi langsung dengan semua kalangan (pemerintah, masyarakat sipil, akademisi. SDGs juga mengkaji masalah-

masalah yang lebih beragam dan detail, serta menyoal seluruh penduduk pada semua kelompok usia dan latar belakang dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan anti kekerasan.

SDGS merupakan refleksi dari nilai-nilai dan ambisi Australia yang berkomitmen untuk melakukan pendekatan global dalam mengurangi kemiskinan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan menjamin perdamaian dunia dan kemakmuran diseluruh dunia. SDGs mencerminkan nilai-nilai yang di junjung tinggi oleh Australia untuk melindungi seperti menjaga lingkungan, akses terhadap layanan dan jasa, HAM, kelembagaan yang kuat dan mudah di akses, ekonomi inklusif, dan mendukung keberagaman dan komunitas, kebudayaan masyarakat asli dan bangunan cagar budaya sedangkan dukungan terhadap politik, ekonomi, sosial dan kebebasan bergama dengan berkomitmen dan mempromosikan demokrasi, supermasi hukum dan ketertiban internasional yang berbasis aturan. Dengan tercapainya SDGs dapat memberikan kontribusi bagi Australia baik regional maupun global dalam meningkatkan kesejahteraan, produktivitas maupun stabilitas yang konsen terhadap sektor pendidikan, pertanian, sanitasi, lingkungan, ekonomi dan kesetaraan gender dan konsen terhadap isu-isu seperti mobilisasi sumberdaya domestik, perdagangan, investasi infrastruktur dan layanan publik untuk mendukung kesejahteraan baik dalam maupun luar negeri.

Untuk menerapkan prinsip SDGs Australian Aid mencoba untuk merambah kawasan Indo-pasifik dengan membangun kemitraan yang memprioritaskan tantangan pertumbuhan, perubahan iklim, pasar dan menyediakan layanan di daerah kecil dan lingkungan terisolasi. Dalam program bilateral tersebut Australian Aid

telah memberikan bantuan regional mendukung perempuan di 14 negara untuk berpartisipasi secara penuh, bebas dan aman dalam politik, ekonomi dan sosial kehidupan dalam peningkatan kesetaraan gender yang lebih besar, terutama dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, meningkatkan keadaan ekonomi di negara, tingkat lokal dan rumah tangga ini merupakan inisiatif multi-stakeholder, bekerja dengan berbagai mitra dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga regional dan multilateral yang berfokus pada kepemimpinan, pemberdayaan ekonomi, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, lembaga regional yang efektif, masyarakat yang sehat dan tangguh, dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan serta mengatasi kemiskinan.

Australia membentuk Pacific Development yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender di Pasifik, dimana dalam lima tahun pertama, setidaknya ada sekitar 10.605 perempuan mengambil peran kepemimpinan di masyarakat baik ditingkat Provinsi maupun nasional, terdapat 5.964 perempuan mengakses pelatihan literasi keuangan dan jasa keuangan dan lebih dari 526.000 orang berpartisipasi dalam sesi kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan. Pemberian bantuan oleh negara maju kepada negara berkembang dianggap sebagai sarana yang tepat bagi kedua negara untuk mencapai kepentingan masing-masing seperti yang telah dilakukan oleh Australia dan Indonesia dimana dalam upaya pencapaian tujuan SDGs oleh Indonesia dan Australian Aid kedua negara ini mencoba untuk membuat satu relasi kemitraan melalui program Mampu dengan memperkuat dasar hukumnya melalui Subsidiary Arrangement Between

The Government Of Indonesia And The Government Of Australia Relating To Australia-Indonesia Partnership For Empowering Indonesian Women For Poverty Reduction Program, register Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 74858801 tanggal 18 november 2013.

Melalui Kemitraan ekonomi, Australia membantu Pemerintah Indonesia Targetkan pengeluaran publik lebih efisien. Pada 2016, dalam kerjasama melalui Australian Aid membantu Indonesia untuk meningkatkan target perlindungan sosial program, termasuk dengan memperbarui database yang terdiri dari 25.800.000 rumah tangga di 2017, Australia mendukung Reformasi listrik pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan sekitar 40% rumah tangga yang tergolong miskin dengan total bantuan \$1.6 milyar untuk perbaikan konstruksi listrik dan infrastruktur di daerah terpencil.

B. Pentingnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Kualitas hidup merupakan aspek terpenting dalam kesehatan dimana nilai kualitas hidup seseorang dapat dilihat dari aspek fisik, mental dan kehidupan sosial (Negah Tavakoli et.al 2016). World Health Organization (WHO) mengungkapkan bahwa kualitas hidup suatu keadaan dimana adanya keseimbangan antara fungsi fisik, mental, dan sosial Sehingga pengukuran kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan meliputi fisik, psikologi (kognitif dan emosional), dan sosial.

Terkait peningkatan kualitas hidup perempuan sendiri masih patut di pertanyakan pasalnya Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih marak terjadi baik dinegara berkembang maupun negara maju. Kekerasan terhadap perempuan

dan anak merupakan isu yang sangat serius dan harus diatasi oleh semua Negara. Komitmen dunia untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bahkan secara langsung dituangkan dalam beberapa target secara khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan ditunjang oleh target-target lain yang secara tidak langsung mendukung penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pada dasarnya, kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan memaksakan kehendak terhadap perempuan dengan menggunakan tubuh dan seksualitas perempuan sebagai medium atau arenanya. Namun demikian, kekerasan terhadap perempuan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan aparatur penyelenggara negara. Perempuan kerap menjadi korban kekerasan dan rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Di tingkat internasional, Konferensi Dunia tentang HAM di Wina, 1993 merupakan momentum terobosan bagi perjuangan menghapus kekerasan terhadap perempuan, dengan memperkenalkan kepada masyarakat dunia bahwa “hak asasi manusia perempuan dan anak perempuan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia universal”. Dengan demikian, HAM perempuan harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan HAM PBB. Konferensi ini menyatakan kekerasan berbasis gender sebagai pelanggaran HAM, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 sebagai berikut:

“Kekerasan berbasis gender dan segala bentuk penyerangan dan eksploitasi seksual, termasuk yang merupakan akibat prasangka budaya dan perdagangan

internasional manusia adalah bertentangan dengan martabat dan harkat manusia, dan harus dihapuskan.”

Kekerasan terhadap perempuan selanjutnya dijabarkan dalam Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan PBB, 1993 sebagai berikut: Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerugian atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di kehidupan publik atau dalam kehidupan pribadi” (Pasal 1 Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan PBB, 1993).

Indonesia menempati peringkat 105 dari 159 negara dalam Indeks Ketidaksetaraan Gender pada tahun 2016 dimana perempuan rentan terhadap kemiskinan dibandingkan dengan laki-laki, perempuan masih tertinggal dalam hal partisipasi angkatan kerja, partisipasi politik, dan pencapaian pendidikan.



Menurut data diatas menunjukkan bahwa data Bank Dunia pada tahun 2018 sekitar 50,7% perempuan di Indonesia berusia 15 tahun keatas berpartisipasi dalam angkatan kerja dimana menurut standar internasional termasuk rendah dibandingkan negara-negara lain seperti Kamboja yang merupakan negara dengan PDB terendah kedua di ASEAN malah memiliki angkapa partisipasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 81,2% dan vietnam dengan negara yang berpenghasilan menengah kebawah memiliki tingkat yang sesuai standart internasional sebesar 73,2% ditahun 2018 serta Thailand diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan menengah memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 60,3% di tahun 2018.

Kemajuan dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan semakin diakui sebagai bagian yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. Indonesia juga berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercermin dari berbagai peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut secara khusus juga dituangkan dalam program utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik menyusun publikasi Statistik Gender Tematik yang mengambil tema Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Perempuan dengan program 3 Ends yang salah satunya adalah “Akhir kekerasan terhadap perempuan dan anak”. Komnas Perempuan sendiri mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan terhadap perempuan yang mengakibatkan

kerugian dan penderitaan fisik seksual ataupun psikologis terhadap perempuan baik perempuan dewasa atau anak perempuan dan remaja.

Komnas perempuan sendiri membagi 3 relasi antara korban kekerasan terhadap perempuan yaitu

1. Kekerasan dalam area Domestik hubungan intim personal merupakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam ranah keluarga seperti memiliki hubungan darah, kerabat, perkawinan (pasangan suami-istri) dan ranah personal (pacaran)
2. Kekerasan dalam ranah publik atau komunitas merupakan dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan ataupun keluarga yang meliputi cakupan yang luas seperti tempat umum, tempat kerja maupun tempat lainnya
3. Kekerasan lingkup negara merupakan kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan atau didiamkan oleh negara dimana terdapat pelanggaran HAM, pertentangan kelompok, konflik maupun perbudakan.

Adapun bentuk dari kekerasan terhadap perempuan sendiri yaitu berupa kekerasan fisik seksual dan psikologis serta kekerasan ekonomi yang sering terjadi dalam ruang lingkup keluarga atau personal. Rumah maupun keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perempuan justru menjadi tempat dimana mereka beresiko mengalami kekerasan, diluar rumahpun perempuan dan anak juga sering mendapatkan kekerasan baik kekerasan fisik maupun seksual termasuk

diskriminasi. Untuk mengurangi tingginya angka kekerasan terhadap perempuan Indonesia sendiri sudah memiliki undang-undang yang mengatur terkait tentang kekerasan terhadap perempuan yaitu :

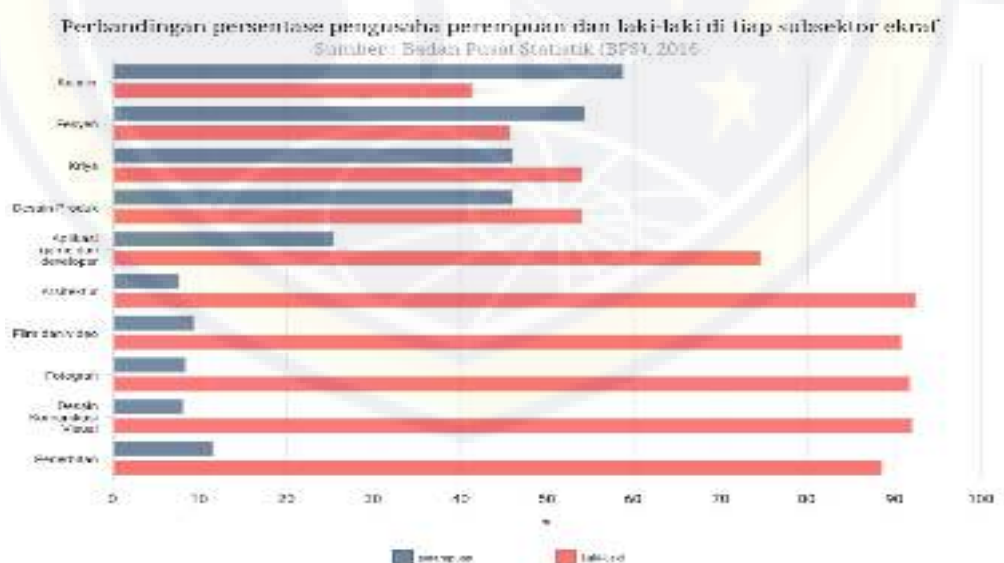
No	Peraturan perundang-undangan	Ruang Lingkup
Undang-undang		
1	UU Nomor 21 Tahun 2007	Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
2	UU Nomor 23 Tahun 2004	Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga
Peraturan pemerintah		
1	Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2008	Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
2	Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2006	Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT.
Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1	Peraturan Menteri PPPA nomor 1 tahun 2017	Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Ana
2	Peraturan Menteri PPPA Nomor 9 tahun 2016	Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.
3	Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 tahun 2015	Rencana Strategis KPPP tahun 2015-2019
4	Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 tahun 2015	Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Peraturan Menteri PPPA No. 6 Tahun 2015	Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Peraturan Mentri PPPA nomor 2 Tahun 2013	Panduan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di daerah.

7	Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2013	Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan (dekonsentrasi) bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2014 kepada 12 Gubernur pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah.
8	Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2011	Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan
9	Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2011	Pedoman Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan.
10	Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2010	Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak (RAN PPKTA).
11	Peraturan Menteri KPPPA Nomor 05 Tahun 2010	Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
Peraturan Kementrian lainnya		
1	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2007	Juknis Penyusunan dan Penerapan SPM.
2	Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:1226/Menkes/SK/XII/2009	Pedoman Penata laksanaan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Rumah Sakit

Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur kekerasan terhadap perempuan namun belum memberikan solusi yang jelas terkait permasalahan ini Menurut komnas perempuan kekerasan terhadap perempuan tiap tahunnya mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dari CATAHU (catatan tahunan) komnas perempuan yaitu pada tahun 2015 sebesar 321.751 kasus yang meliputi

kekerasan area domestik hubungan intim personal sebesar 69% dan ranah komunitas mencapai 31%. dimana pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan yaitu sebesar 259.150 kasus namun kembali melonjak pada tahun 2017 sekitar 74% dengan jumlah kasus sebesar 348.446 sedangkan pada 2018 sendiri mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 14 % dengan jumlah kasus sebesar 406.178 kasus dengan presentase 71 % di ranah domestik hubungan intim personal, sedangkan komunitas sebesar 64%, dari data yang disajikan hal ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia masih belum efektif dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan baik itu anak perempuan maupun remaja. Meskipun demikian pemerintah mencoba untuk melakukan yang terbaik dengan mendukung peningkatan kesetaraan perempuan dan penurunan kemiskinan baik diranah lokal maupun internasional salah satunya melalui program mampuan.

Selain mengalami masalah kekerasan faktanya bahwa masih mendominasinya laki-laki dalam 14 subsektor dalam dunia pekerjaan dimana



perempuan hanya unggul di dua sektor saja yaitu fesyen sekitar 54,25% dan kuliner



dengan presentase 58,68% sedangkan laki-laki merambah keseluruhan aspek dan terus bertambah tiap tahunnya.

Selain itu masalah yang harus dihadapi kaum perempuan yaitu menurut data Badan Pusat Statistik dalam laporan perekonomian 2019 mencatat bahwa terdapat kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan dimana laki-laki memiliki upah lebih tinggi dibanding perempuan dimana menurut BPS bahwa kesenjangan ini merupakan isu yang sudah cukup lama dan adanya anggapan bahwa perempuan kurang berkontribusi dan cenderung ditempatkan pada posisi yang cukup rendah, ini merupakan masalah dan tantangan bagi pemerintah maupun LSM lokal dalam meningkatkan partisipasi perempuan dan posisi yang setara dalam dunia ketenagakerjaan, penurunan kemiskinan serta upaya meningkatkan kesetaraan gender.

C. Program Mampu

MAMPU merupakan salah satu program kerjasama Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang mendukung pencapaian

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam meningkatkan akses perempuan miskin terhadap layanan dan program pemerintah dengan mengembangkan kapasitas kolektif perempuan dan memberdayakan mereka untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat desa hingga nasional.

Pemerintah Australia memiliki komitmen teguh dan terus menerus untuk berada di garis depan dalam upaya untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, khususnya di wilayah Indo-Pasifik. Dalam kebijakan luar negeri Australia memprioritaskan memperkuat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui upaya, diplomasi ekonomi dan pembangunan yang memiliki peran penting dalam menjalin kerjasama dalam mengatasi dampak diskriminasi dimana adanya komitmen internasional untuk mengatasi dampak dari kekerasan terhadap perempuan dalam mempromosikan kontribusi kesetaraan gender untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kesetaraan gender adalah tentang kesempatan yang sama, hak dan tanggung jawab bagi perempuan dan laki-laki, hal ini tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama, melainkan ketidaksetaraan gender adalah hasil dari distribusi kekuasaan yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki yang diperburuk oleh diskriminasi yang masih marak terjadi kelemahan dalam undang-undang, kebijakan dan lembaga, serta hubungan sosial yang menormalkan ketidaksetaraan.

Australia memiliki beberapa tantangan terbesar untuk meningkatkan kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan di wilayah Indo-Pasifik namun mereka yakin bahwa dengan membangun sebuah kerjasama dan

bermitra dapat meningkatkan kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang saling memperkuat dan secara signifikan berkorelasi dimana hubungan ini berjalan dua arah Pertama, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berkontribusi pada pertumbuhan, pembangunan dan stabilitas serta adanya peningkatan Produk domestik sebanyak dua persen, sebesar US \$ 1,5 miliar jika perempuan dan laki-laki bisa berpartisipasi sama dalam perekonomian selain itu perempuan dapat meningkatkan pendapatan mereka hingga 76% jika kesenjangan partisipasi kerja dan kesenjangan upah antara pria dan wanita ditutup Ini dihitung memiliki nilai global US \$ 17 miliar, perempuan petani disediakan dengan akses yang sama terhadap sumber daya bisa mengurangi kurang gizi untuk sekitar 100-150 juta orang.

Melalui kerjasama Australian Aid program MAMPU bertujuan untuk meningkatkan permintaan dan penyediaan layanan dasar yang lebih baik melalui advokasi perempuan miskin, MAMPU mempengaruhi perubahan kebijakan dan anggaran pemerintah dimana kesetaraan gender adalah hak penting dan dorongan yang kuat untuk pertumbuhan, perkembangan dan stabilitas dimana saat ini perempuan masih tertinggal dalam hal partisipasi angkatan kerja, partisipasi politik, dan pencapaian pendidikan.

Australian Aid sendiri mendukung program pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dalam meningkatkan kesetaraan gender dengan mencapai tujuan SDGs di indo-pasifik dalam upaya meningkatkan partisipasi kerja dan penurunan kemiskinan melalui program yaitu :

1. Meningkatkan suara perempuan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan dan pembangunan perdamaian disebabkan kurang keterwakilannya perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang cukup rendah, maka dari itu peran organisasi dan koalisi perempuan sangat penting untuk memastikan perspektif perempuan didengar. Maka dari itu Australia akan mendukung pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan perempuan, perdamaian dan keamanan dan memastikan bahwa perempuan berpartisipasi secara efektif pada semua tahap proses perdamaian dan rekonstruksi. Kami akan mendukung fokus yang lebih kuat tentang kesetaraan gender dalam tanggapan krisis kemanusiaan dan mempromosikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dalam upaya respon dan pemulihan. Perdamaian dan Keamanan dimana Pemerintah Australia telah berkomitmen, nasional dan internasional, yaitu:

- a. mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan Australia tentang perdamaian dan keamanan
- b. menanamkan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan dalam manajemen sumber daya manusia Pertahanan, Kepolisian Federal Australia dan personil dikerahkan
- c. mendukung organisasi masyarakat sipil untuk mendorong partisipasi kesetaraan dan peningkatan perempuan dalam pencegahan konflik, perdamaian, resolusi konflik, dan bantuan dan pemulihan

- d. memajukan perempuan, perdamaian dan keamanan pelaksanaan internasional dan memperkuat organisasi perempuan baik lokal maupun internasional

Wanita dapat dan memainkan peran kunci dalam pencegahan konflik, negosiasi perdamaian dan pembangunan perdamaian, tapi terlalu sering dikecualikan dari upaya ini namun Australian Aid konsisten memajukan kesetaraan gender dalam forum-forum regional dan multilateral dan dialog bilateral dengan mempromosikan dan mendukung perempuan dalam memiliki akses dan partisipasi yang sama dengan laki-laki dalam pengambilan keputusan serta mendukung resolusi PBB 1325.

2. Mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam konteks partisipasi ekonomi perempuan membantu untuk mendorong pertumbuhan di tingkat nasional dan mengurangi kemiskinan dalam masyarakat dan rumah tangga. Australian Aid akan mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran dengan meningkatkan bantuan untuk investasi perdagangan sekitar 20% dari program bantuan pada tahun 2020 dan mendukung pekerja perempuan dan untuk meningkatkan upah, kondisi kerja dan keselamatan serta menghapus diskriminasi. Jim Yong Kim, mengungkapkan bahwa Perempuan terdiri hampir setengah dari pekerja pertanian di dunia tetapi memiliki akses kurang dari laki-laki untuk sumber daya produktif dan peluang. Meningkatkan akses perempuan bisa meningkatkan hasil pertanian perempuan dengan 25%-30% dan meningkatkan hasil pertanian

dinegara-negara berkembang antara 2,5%-4% namun prioritas perempuan, kebutuhan dan kepentingan yang sering diabaikan dengan pekerjaan yang lain.

3. Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan mengambil berbagai bentuk termasuk: kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemerkosaan, pernikahan anak dan perdagangan perempuan. Menurut Ban Ki-moon, untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan sebaiknya dilakukan secara efektif disebabkan semakin beragamnya kekerasan terhadap perempuan dimana dapat berefek pada kesehatan fisik maupun psikis korbannya maka dari itu peningkatan kualitas layanan dan tanggapan, akses terhadap keadilan, dan pencegahan harus lebih ditingkatkan terutama prespon terhadap perlindungan korban.

Pemerintah Australia mendukung untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dengan mendukung pemerintah untuk mengembangkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan akses mereka terhadap sistem peradilan, terlibat dengan organisasi non-pemerintah untuk membantu akses perempuan keadilan, termasuk dengan meningkatkan pengetahuan perempuan dari sistem hukum dan hak-hak mereka, mendukung konseling yang tepat, akomodasi, dukungan hukum dan praktis untuk wanita dan anak-anak serta Australian Aid juga mengintegrasikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ke dalam kebijakan luar negeri Australia

dengan mendukung tegas dan konsisten untuk kesetaraan gender dan terlibat secara bilateral dan di forum-forum global dan regional dimana Australia telah sepakat untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan partisipasi tenaga kerja laki-laki sebesar 25% pada tahun 2025 yang dapat meningkatkan angkatan kerja perempuan sebesar 100 juta serta pada tahun 2015 Australian Aid telah memberikan bantuan sekitar \$50 miliar untuk memperkuat kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayah Indo-Pasifik. Tujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Program MAMPU sendiri mendukung dan bekerjasama dengan LSM lokal, pembuat kebijakan di tingkat lokal dan nasional sehingga kebijakan, peraturan dan alokasi anggaran layanan pemerintah dapat meningkatkan akses pada program perlindungan sosial Pemerintah Indonesia, memperbaiki kondisi dan menghapuskan diskriminasi di tempat kerja, memperbaiki kondisi migrasi tenaga kerja perempuan di luar negeri, Meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

BAB IV

Dampak Program MAMPU Australian Aid di Donggala Sulawesi

Tengah

a. DAMPAK PROGRAM MAMPU

Bantuan Australian Aid dalam program MAMPU merupakan peningkatan kerjasama internasional Australia dengan pemerintahan Indonesia dalam membuat perubahan dalam jangkauan yang luas dalam hal kesetaraan gender untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia dan program pemerintah lainnya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan pemberdayaan perempuan serta mendukung tercapainya SDGs pemerintah Indonesia.

Menurut Fleur Davies selaku Minister Counsellor of Governance and Human Development of Australian Embassy, Program Mampu dapat memberikan manfaat kepada perempuan miskin serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan telah berkomitmen untuk berbagi pengalaman keahlian dan kedekatan dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta akan melanjutkan kemitraan yang kuat antara pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia.

Kerjasama antara Indonesia dan Australia melalui program MAMPU merupakan sebuah bentuk dukungan Australia terhadap Indonesia yang dibangun berdasarkan pengalaman kemitraan kedua Negara dimana kerjasama ini sudah berjalan selama 2 fase yang mendukung dan berkontribusi dalam mencapai target pemerintah Indonesia mealalui nawacita dan RPJMN. Imron Bulkin selaku

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas berharap program MAMPU dapat mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia seperti yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Adapun yang menjadi tujuan dalam program MAMPU yaitu :

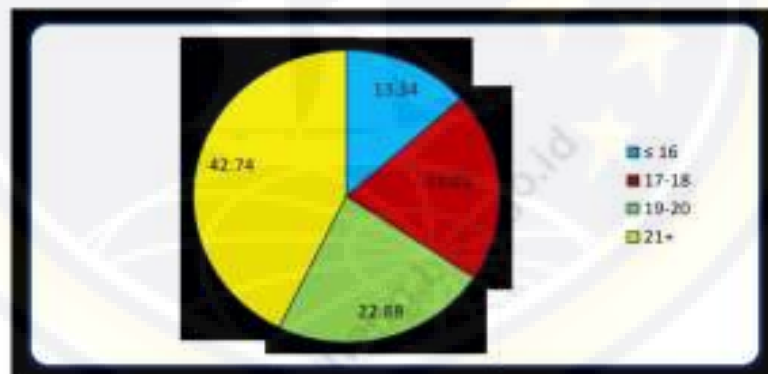
4. Meningkatkan akses perempuan ke program perlindungan sosial pemerintah
5. Meningkatkan akses perempuan ke pekerjaan dan menghilangkan diskriminasi di tempat kerja
6. Meningkatkan kondisi migrasi buruh wanita di luar negeri
7. Memperkuat kepemimpinan wanita untuk kesehatan ibu dan reproduksi yang lebih baik.
8. Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Program MAMPU di Donggala sendiri mencoba untuk meningkatkan pelayanan warga miskin yang belum memiliki kartu identitas seperti KTP, KK dan Aktekelahiran serta perlindungan sosial yang penting dalam mengatasi kemiskinan dengan mengurangi ketimpangan dan ketahanan rumah tangga dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui system perlindungan sosial menyeluruh melalui skema jaminan kesehatan nasional (JKN), dimana masih banyak perempuan miskin dan perempuan sebagai kepala rumah tangga serta mereka yang tinggal di daerah terpencil masih terhambat dalam mengakses program perlindungan sosial termasuk layanan kesehatan reproduksi hal ini dapat

dilihat dari tingginya angka kematian ibu disulawesi tengah dalam skala nasional diatas 300 jiwa per 100.000 kelahiran pada tahun 2013 (irmwati, 2015). Program MAMPU sendiri setidaknya Sepanjang tahun 2017 telah membantu 250 orang ibu hamil dalam mengaksesfasilitas kesehatan.

Perkawinan usia dibawah 19 tahun secara kesehatan reproduksi masih terbilang muda secara mental sosial, ekonomi yang belum mapan. Hal ini lah yang menyebabkan tingginya angka kekerasan terhdap perempuan, kematian ibu dan sitem reproduksi yang kurang sehat dimana semakin muda usia kawin maka akan semakin lama pula masa reproduksinya dari data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) pada tahun 2015 dimana perkawinan anak sudah mencapai 31,9% dimana rata-rata anak berusia 15-19 tahun berstatus menikah dan sudah pernah menikah. Menurut data BPS diatas menunjukkan bahwa

Persentase Penduduk Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Sulawesi Tengah 2018



presentasi perempuan yang menikah dibawah 19 tahun meningkat dibanding dibandingkan pada tahun 2015.

Selain meningkatkan partisipasi perempuan program MAMPU juga berperan aktif dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan karena kekerasan terhadap

prempuan dan anak menyebabkan diskriminasi dan ketidak setaraan gender yang memberikan dampak kepada korban baik fisik maupun psikis. Sulawesi Tengah sendiri jumlah kekerasan perempuan dan anak meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2014 menurut data KPPA Sulteng (Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Sulteng) terdapat 10 kasus pemerkosaan anak perempuan di sulteng dan merupakan angka yang begitu tinggi, menurut P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak). Angka kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi dimana KDRT sebanyak 75,76% , tempat kerja 2,02% dan di tempat lain sebesar 22,22% pada tahun 2015 jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 446 kasus menurut DP3A (Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak).

Kekerasan terhadap perempuan sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat bahkan pasangan sekalipun dimana rumah yang seharusnya menjadi tempat aman justru menjadi tempat dimana kita mendapat kekerasan yang sebagian besar dilakukan oleh orang terdekat, nyatanya di Sulawesi tengah sendiri termasuk di Donggala perempuan cenderung untuk tidak menceritakan terkait kekerasan yang dialami karena malu akan tanggapan masyarakat sekitar dan terkesan menyembunyikannya sedangkan perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menyembunyikan hal yang dialami karena takut disalahkan oleh keluarga dan lingkungan sekitar dan cenderung menyalahkan korban dan menganggap itu aib keluarga.

Melalui program MAMPU yang bekerjasama dengan pihak KPKPST setidaknya membuat 6 posko pengaduan terhadap kekerasan perempuan di Donggala pada tahun 2016 memberikan perubahan signifikan yang terlihat pada

respon masyarakat khususnya pada perempuan dan pemerintah desa yang secara sukarela menjadi relawan kader pendamping di masing-masing desa yang membantu advokasi kasus perempuan dan anak di dalam komunitas setidaknya terdapat 16 kader pendamping yang tersebar di enam desa yang berperan dalam mendampingi para korban yang telah melapor ke posko pengaduan.

Menurut Salma selaku kordinator posko mengungkapkan bahwa dengan adanya posko pengaduan ini setidaknya merubah pandangan dan pola pikir masyarakat bahwa persoalan kekerasan yang dialami perempuan dalam ranah domestik rumah tangga maupun kekerasan seksual yang dialami bukan hal yang tabu dan aib lagi untuk di ungkapkan melainkan itu merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan salah satu bentuk ketidak setaraan gender dan suatu keharusan bagi korban untuk melaporkannya. Dengan adanya relawan diposko pengaduan yang berkorelasi yang berjaringan dengan pemda dan lembaga adat, perempuan berani dan mau menceritakan kasusnya dan mendapatkan pendampingan dari relawan posko dimana setidaknya pada tahun 2016 sebanyak 16 kasus 2017 terdapat 35 kasus yang ditangani dan diselesaikan dan telah menyelesaikan setidaknya 10 kasus terhadap pernikahan anak dan perlindungan anak.

Dalam peningkatan dan pelayanan masyarakat miskin terhadap layanan publik ditandai dengan di bentuknya posko pengaduan dan advokasi terhadap masyarakat miskin yang ingin melaporkan masalah perlindungan sosial, warga miskin yang tidak menerima kartu JKN dan KIP (kartu Indonesia Pintar) dan bantuan pemerintah lainnya serta pendataan masyarakat miskin dan membantu

pendampingan warga dalam mendapatkan hak-haknya dan Membantu setidaknya sepanjang 2017-2019 membantu masyarakat yang sulit mendapatkan akses dalam mendapatkan KTP, KK dan akte kelahiran sebanyak 250 jiwa.

Adapun jumlah kader pendampingan terhadap akses layanan sekitar 27 orang yang tersebar di 5 desa yang bertugas untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat dalam pemenuhan hak-haknya. Setidaknya pada tahun 2016 sebesar 150 jiwa masyarakat miskin yang telah dibantu dalam mendapatkan akses terhadap kartu JKN dan mengalami peningkatan sepanjang 2017-2019 sekitar 3.500 jiwa setidaknya dari total jumlah penduduk di Donggala sekitar 300,628 jiwa total kepesertataan kartu JKN sebesar 257.838 jiwa sekitar 85.44%.

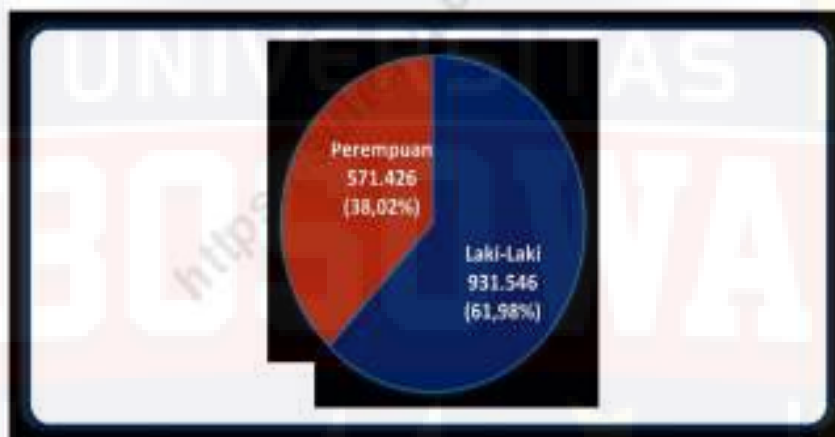
Membantu mengadvokasi bantuan air bersih sebesar 150 juta terhadap masyarakat miskin. Membuat kegiatan pemberian makanan tambahan dalam upaya mengurangi stunting sebesar 9,4 juta tiap tahunnya. Memberikan sekitar 85 pasang sepatu dan 150 tas dan perlengkapan sekolah kepada anak-anak yang kurang mampu meningkatkan partisipasi perempuan dimana terdapat beberapa anggota pelatihan yang berhasil menduduki jabatan di ranah desa yaitu sekitar 10 orang menjadi kordinator BUMDES (Badan usaha milik Desa) menjadi kepala desa adat sebanyak 3 orang pengambil kebijakan dalam hukum adat sebanyak 11 orang, menjabat di BPD (Badan permusyawaratan desa) sebanyak 8 orang, menjabat sebagai panwas sebanyak 7 orang dan menjadi anggota KPPS sebanyak 30 Orang.

Partisipasi perempuan dalam lingkungan kerja di Sulawesi Tengah masih cukup rendah hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi kerja perempuan yang masih relatif rendah yang hanya sebesar 57,26% dan pria sebesar 88,% ini dikarenakan masih terbatasnya akses perempuan terhadap

layanan pekerjaan dimana perempuan dianggap sebagai bertugas untuk mengurus rumah dan laki-laki yang bertugas untuk menafkahi perempuan.

Menurut data BPS pada tahun 2017 setidaknya angka partisipasi kerja perempuan

Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Sulawesi Tengah, Agustus 2018



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2018

mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang mencapai 59,70 sedangkan laki-laki masih cukup tinggi di angka 89,65%. Menurut data BPS diatas menunjukkan bahwa partisipasi kerja perempuan dan laki- laki periode januari-agustu memiliki perbedaan yang cukup jelas dimana partisipasi laki-laki dalam angkatan kerja sebesar 61,98% sedangkan perempaun hanya sebesar 38,02%.

Dalam skema kerjasama ini untuk mencapai tujuan dari Program MAMPU khususnya di daerah Donggala Sulawesi Tengah, setidaknya terdapat 4 posko pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan yang diharpkan dapat memberikan perlindungan dan advokasi terhdap korban yang dibentuk di wombo

Induk, Mpanau, Kalonggo dan Tompe dan terdapat 3 posko pengaduan terhadap masyarakat yang ingin mengakses layanan social terhadap masyarakat miskin yang ingin mengakses layanan kesehatan yaitu kartu JKN dengan di bentuknya posko ini diharapkan dapat mengakhiri kekerasan terhadap perempuan baik di ruang public maupun pribadi untuk mengakhiri segala diskriminasi dan memberdayakan perempuan yang dapat menghubungkan mereka dengan layanan yang dapat mereka akses ketika menghadapi kekerasan, penanganan kasus, rujukan dan bantuan hokum serta kegiatan simpan pinjam dan kegiatan menghasilkan pendapatan.

b. Mitra Lokal

Kerjasama merupakan salah satu yang menjadi pilihan bagi aktor internasional dalam meningkatkan dan memfasilitasi hubungan politik dan ekonomi dengan menerapkan metode diplomasi, hubungan ekonomi, hukum internasional maupun organisasi internasional guna mengontrol terjadinya konflik dan mengatur serta meningkatkan kerjasama ke arah yang lebih baik. Dalam kerjasama sendiri terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu adanya dua aktor atau lebih, interaksi dan tujuan bersama. Kerjasama merupakan sebuah cara untuk meningkatkan dan memberikan manfaat terhadap perekonomian yang pada dasarnya setiap negara ingin memenuhi kebutuhan negaranya maka dari itu untuk memenuhi hal tersebut suatu negara akan melakukan interaksi dan komunikasi terhadap negara yang diharapkan dapat memberikan bantuan kerjasama.

Saat ini kerjasama merupakan suatu keharusan oleh setiap negara dalam menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kedaulatan dan hak-hak negara lain dimana dalam kerjasama tersebut terjadi interaksi, interelasi dan interdependensi antara individu dan individu, individu dan kelompok dari satu kesatuan unit dalam sistem internasional dan masyarakat internasional. Meskipun negara menjadi salah satu aktor yang dominan saat ini dalam rangkaian kerjasama internasional namun organisasi internasional juga mengalami perkembangan yang pesat baik dalam bentuk serta pola kerjasamanya dimana peran organisasi internasional semakin signifikan yang tidak hanya melibatkan negara beserta pemerintah saja namun telah di akui juga keberadaan organisasi nonperintah dalam segi jumlah mengalami peningkatan dan mampu memposisikan diri sebagai modern kontrol.

Australian Aid selaku organisasi internasional pemerintah Australia terus membangun hubungan kerjasama internasional salah satunya dengan pemerintah Indonesia melalui sebuah program yang harapannya dalam kerjasama ini hubungan kedua negara dapat terus ditingkatkan baik itu dalam bidang kerjasama ekonomi, politik, perdagangan investasi sosial budaya dan pendidikan dengan begitu diharapkan mampu membuka peluang kerjasama baru tak terkecuali bidang pertahanan. Menurut Fleuer Davies Bantuan Australian Aid melalui program MAMPU sendiri tidak hanya berkontribusi pada target dan prioritas pemerintah Indonesia melainkan memberikan dampak bagi sasaran Australian Aid Investment Plan untuk Indonesia dan untuk mencapai strategi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Australia.

Australian Aid setidaknya telah mendukung Program pengembangan dan pemberdayaan perempuan sekitar 950 kelompok perempuan lokal di seluruh Indonesia, yang membantu 17.409 anggota perempuan mereka untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang berpengaruh pada kebijakan di bidang-bidang seperti peningkatan akses perempuan terhadap lapangan kerja dan penguatan kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

KPKPST (Kelompok Perjuangan Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah) sebagai mitra lokal Australian Aid melalui program MAMPU diharapkan dalam kerjasama yang terjalin dapat memberikan advokasi dan pendampingan bagi perempuan yang mengalami kekerasan, memberikan informasi terkait kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi perempuan dan kepemimpinan perempuan di ranah privat maupun publik serta memberikan akses perempuan terhadap layanan dasar.

KPKPST merupakan LSM lokal yang terbentuk sejak tahun 2000 yang bertujuan sebagai agen perubahan sosial secara menyeluruh untuk mendorong peran dan posisi perempuan sudah seharusnya dilakukan secara bersama dengan berbagai pihak tidak hanya dengan perempuan, organisasi perempuan namun seluruh elemen yang berkaitan baik itu lokal maupun Internasional. Upaya peningkatan partisipasi perempuan dan penanganan advokasi terhadap perempuan oleh KPKPST pada mulanya dilaksanakan di Poso karena adanya konflik pada saat itu disana KPKPST juga berperan sebagai mitra lokal organisasi internasional seperti UNFPA, UNDP dalam menangani masalah perempuan di daerah konflik. Pasca berakhirnya konflik di Poso kemudian sekitar 2012 KPKPST berpindah ke Kota Palu dalam

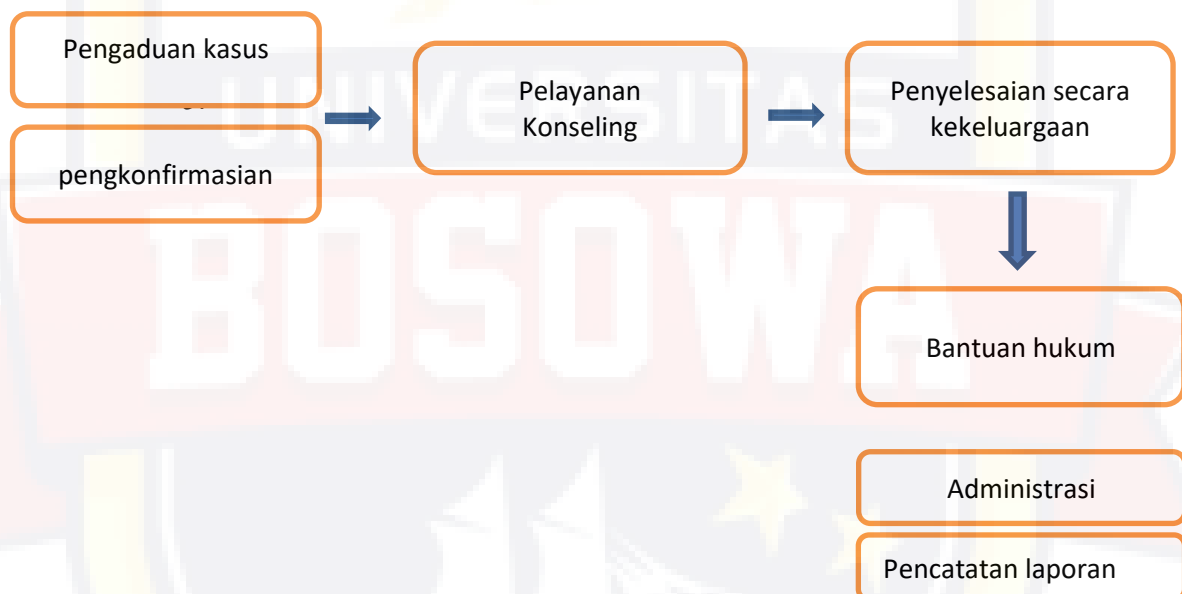
mengadvokasi dan memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan, Setidaknya sekarang KPKPST telah memiliki kurang lebih 50 orang relawan yang tersebar di seluruh wilayah di Sulawesi Tengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi perempuan KPKPST berkomitmen untuk melibatkan dan meningkatkan peran perempuan melalui advokasi dan pelatihan dengan membangun kerjasama dengan mitra luar negeri salah satunya program MAMPU dan berperan sebagai mitra local dalam mengadvokasi perempuan dalam pendampingan kekerasan di donggala Sulawesi Tengah. Australia Aid dan KPKPST bukan kali pertama melakukan kerjasama ini merupakan kali kedua setelah kerjasama pada tahun 2009-2010. Pengalaman dan peran KPKPST dalam bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional sehingga menjadi salah satu faktor pendorong terjalinnya kerjasama antara Australian Aid dan KPKPST.

Dengan terjalinnya kerjasama Australian Aid dengan mitra lokal dalam upaya meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan kesetaraan gender KPKPST selalu mengadakan penyuluhan setidaknya 2 kali dalam seminggu terkait bagaimana bentuk-bentuk kekerasan terjadi dan mengajak masyarakat agar tidak malu dan merasa tabu terkait kekerasan yang dialami dan mau berbicara terkait permasalahan yang dihadapi termasuk dalam KDRT, kekerasan fisik maupun seksual untuk menekan angka pernikahan anak KPKPST jug mengadakan sosialisasi kepada remaja perempuan setidaknya sekali dalam seminggu terkait masalah pernikahan dini dan kesehatan reproduksi, KPKPST juga mengadakan sosialisasi terhdap laki-laki untuk berperan aktif dalam mengurangi tindakan

kekerasan dan diskriminatif kepada perempuan hal ini terlihat dalam berpartisipasi sejumlah laki-laki dalam pendampingan korban kekerasan dan membantu tercapainya sejumlah program-program yang dilakukan dan membangun koordinasi dengan pemerintah setempat untuk mendukung program KPKPST sebagai mitra local.

Sebagai mitra local dari Australian Aid KPKPST berupaya untuk memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan dengan tahapan :



Melalui posko pengaduan yang telah dibentuk apa bila mendapat laporan terkait kekerasan misalnya dari korban sendiri maka pendamping akan langsung melakukan pelayanan konseling apa bila terdapat luka fisik maka akan di bawa ke Rumah sakit atau puskesmas terlebih dahulu untuk diobati kemudian menanyakan terkait kekerasan yang dialami kemudian korban akan Dediberikan bimbingan setelah itu apa bila masih bisa di selesaikan maka akan dibicarakan melalui aparatur desa didampingi oleh relawan pendamping apa bisa diselesaikan secara baik-baik atau tidak dan apa bila tida dapat di selesaikan secara kekeluargaan maka akan

dibawah ke pihak berwenang untuk menerima putusan. Pihak pos pengaduan yang dibentuk juga berperan dalam proses membantu korban mengatasi masalah traumanya.

Namun apa bila keluarga atau masyarakat yang melaporkan terkait tindak kekerasan yang dialami oleh korban maka pendamping harus mengkonfirmasi langsung pada korban dan apa bila korban mengelak dan malah menyembunyikan terkait kekerasan yang dialami atau cenderung menolak pendampingan dan tidak mau berpartisipasi dan memberikan informasi untuk menyelesaikan kasusnya maka pendamping tidak akan melakukan pendampingan kecuali korban bersedia untuk di damping.

Australian Aid sebagai organisasi internasional membangun kerjasama dengan mitra local KPKPST dengan menyediakan pembiayaan dan perencanaan melalui sebuah program yaitu MAMPU yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap layanan dasar jadi peran KPKPST dalam kerjasama ini selain memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan juga sebagai tim monitoring dan evaluasi di posko pengaduan yang telah di bentuk. Dengan terjalannya kerjasama ini diharapkan mitra lokal dapat memberikan informasi serta memastikan akses perempuan terhadap advokasi dan layanan dasar serta partisipasi dan peran perempuan di ranah publik maupun domestik telah menerima manfaat pembangunan ekonomi negara berkembang dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan lokal dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

C. Metode

Indonesia merupakan salah satu mitra yang penting bagi Australia baik politik, ekonomi maupun keamanan dilihat dari kerjasama internasional berbagai bidang yang terjalin meskipun kedua negara ini sangat berbeda baik dari sisi budaya, etnis, ras dan agama namun mereka mencoba menjalin kerjasama dengan prinsip *good-neighbordlines*. Indonesia menjadi negara ketiga yang mendapatkan bantuan ODA Australia terbesar hal ini menunjukkan komitmen Australia dan Indonesia dalam mencapai tujuan SDGs dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan gender selain itu Indonesia telah menjadi pasar ekspor barang dan Investasi pertambangan bagi Australia selain itu kerjasama antar kedua negara ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan kawasan dari imigran gelap dan terorisme.

Pemberian bantuan Official Development Assistance (ODA) Australia melalui Australian Aid pada program MAMPU salah satunya di daerah Sulawesi Tengah khususnya di Donggala merupakan salah satu kerjasama internasional Australia dan Indonesia dalam mencapai salah satu tujuan SDGs dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesetaraan gender di kawasan Indo-Pasifik. Pemerintah Australia maupun Indonesia menerima dampak dari kerjasama ini untuk kepentingan masing-masing negara.

“Kerjasama internasional merupakan bentuk perwujudan dari hubungan antara para aktor hubungan internasional yang bersifat mutual. Secara umum, tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk memperkuat hubungan suatu negara dengan negara lainnya demi tercapainya kepentingan nasional negara tersebut, tanpa harus menggunakan kekerasan atau use of force” (Sally dan Chas, 2012)

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa kerjasama internasional terjadi karena adanya kepentingan tiap-tiap negara tanpa menggunakan hard power yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan, ekonomi, politik, sosial maupun kebudayaan. Bantuan Australian Aid terhadap Indonesia dalam program mampu ini merupakan Sebuah program bantuan yang efektif dalam meningkatkan soft power Australia yang memiliki manfaat bagi peningkatan keamanan nasional, hubungan diplomatik dan pengaruh regional di kawasan Indo-Pasifik dimana Australian Aid mencoba membangun kerjasama bilateral dengan Indonesia dimana salah satu faktor pendukung kerjasama internasional yaitu The Shadow of The Future adalah kekhawatiran dimasa mendatang dimana kerjasama yang terjalin pada masa sekarang akan memberikan pengaruh terhadap hubungan kedua bela pihak dimasa mendatang. Terdapat beberapa motif dalam pemberian bantuan luar negeri yaitu motif kemanusiaan suatu negara memberikan bantuan atas dasar kemanusiaan seperti perang, bencana alam meskipun di dasari atas dasar kemnusiaan namun terdapat motif lain yang menunggangi. Motif citra dan harga diri negara maju akan cenderung merasa malu apabila mereka tidak pernah memberikan bantuan luar negeri kenegara lain terutama negara berkembang. Mengamankan kepentingan nasional banyak negara menyalurkan bantuan internasional untuk mengamankan kepentingan nasionalnya seperti keamanan teritorial maupun regional. Kepentingan sendiri dilakukan untuk mendapatkan keuntungan seperti investasi dan pembukaan pasar di negara berkembang Adapun manfaat kerjasama internasional Australian Aid melalui ODA menurut world vision yaitu:

1. Memperkuat reputasi dan pengaruh Australia

Dalam bantuan ODA ini akan memberikan pengaruh dimana bantuan pembangunan efektif dalam memperbaiki kondisi Negara penerima dan memberikan dampak positif terhadap donor dalam hal ini Australian Aid dimana dianggap sebagai penolong, Negara yang murah hati dan sebagai mitra bilateral yang baik

2. Mempromosikan nilai-nilai Australia

Bantuan dapat memiliki efek demokratisasi dengan meningkatkan partisipasi dan penguatan masyarakat yang dapat memajukan nilai-nilai lain seperti kesetaraan gender, ras, keadilan dalam semua hukum, saling menghormati, politik dan kebebasan ekonomi dan beragama.

3. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas keamanan

Menurut Australian Aid kemiskinan merupakan salah satu sumber rasa tidak aman, sehingga dalam bantuan Australia berupaya dalam mengurangi kemiskinan dan mencapai masyarakat yang stabil dalam upaya meningkatkan kesehatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang bertujuan untuk menstabilkan kekuatan ekonomi masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik.

4. Membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara lain

Dengan membangun hubungan bilateral dengan negara donor dan penerima dalam pembangunan dapat memberikan dampak positif terhadap arus bantuan dan arus perdagangan dimana dengan adanya

bantuan internasional dapat meningkatkan ekspor kenegara penerima walaupun tanpa perjanjian yang mengikat satu sama lain.

Bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan bagi negara donor disamping itu juga sesuai dengan manfaat ODA yang diterima oleh pihak Australian Aid dalam mempromosikan stabilitas dan keamanan dimana menurut mereka kemiskinan merupakan salah satu faktor dalam ketidak stabilan dan keamanan maka dari itu bantuan yang mereka berikan berupaya untuk mengurangi kemiskinan dalam meningkatkan masyarakat yang stabil dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kesetaraan gender salah satunya melalui program MAMPU.

Melalui program MAMPU Australian Aid mencoba untuk membangun dan menyentuh ranah lokal dalam artian masyarakat setempat yang dapat memberikan manfaat bagi Australia dalam menjaga ekonomi, sistem politik, dan sosial dalam menstabilkan kebijakan negara penerima bantuan dengan mengetahui seluk-beluk pemerintahan Indonesia di tingkat desa dan kelurahan yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan hubungan diplomatik antara pemerintahan Indonesia dan Australia

Adapun pola kerjasama yang digunakan yaitu dari atas kebawah dalam memberikan pengaruh terhadap pengambil kebijakan maupun pemerintah dalam meningkatkan akses, partisipasi perempuan baik privat maupun domestik dalam mencapai tujuan program mampu. Maka dari itu Australian Aid melalui program MAMPU menjalin kerjasama dengan LSM nasional maupun lokal yang konsen

terhadap isu perempuan dan anak salah satu mitra lokal yang akan saya bahas dalam program ini yaitu KPKPST yang konsen terhadap isu perempuan dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan dan pendampingan korban kekerasan untuk mencapai tujuan dari program mampu yaitu kesetaraan gender, meningkatkan akses perempuan terhadap layanan public, dan memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan fisik maupun seksual.

Kerjasama yang terjalin antara KPKPST sebagai mitra local Australian Aid dalam program mampu bertujuan untuk menginisiasi pendampingan korban secara hokum dan terjun langsung dilapangan yang bertujuan untuk menguraikan terkait kekerasan gender dan membuat agar korban tidak lagi berpotensi mengalami yang namanya kekerasan sehingga tercipta sebuah konsep dalam penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan melalui pengalaman-pengalaman para korban kekerasan seperti dalam kekerasan yang dialami belum memiliki akses peradilan karena belum adanya akomodasi oleh system peradilan terhadap hak-hak korban. Maka dari itu peran masyarakat maupun korban kekerasan perempuan harus berperan aktif dalam melaporkan tindak kekerasan agar dapat memberikan dampak terhadap pihak-pihak yang bekerjasama dalam menginisiasi para pengambil kebijakan.

Dalam pemberian bantuan Australian Aid sesuai dengan kebijakan bantuan pemerintah Australia dengan Bantuan yang diberikan Australian Aid kepada negara berkembang dapat mengurangi kemiskinan, kesetaraan gender dan mencapai pembangunan berkelanjutan dan sejalan dengan kepentingan nasional Australia. Program MAMPU kemitraan Australia dan Indonesia dalam upaya meningkatkan

akses perempuan terhadap layanan baik sifatnya privat maupun domestik dalam meningkatkan kesetaraan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan untuk mencapai tujuan MDGs yang kemudian digantikan oleh SDGs yang memiliki cakupan yang lebih luas. Dalam kerjasama ini Indonesia yang di dampingi oleh BAPPENAS dan Australia di dampingi kementerian dan perdagangan Australia.

Pemerintah Australia telah berkomitmen bahwa program MAMPU dapat memberikan manfaat kepada perempuan miskin dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan berkelanjutan yang dapat mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan di Indonesia seperti yang terdapat di dalam RPJPM 2005-2025 (Rencana Pembangunan Jangka Menengah).

Program MAMPU bertujuan untuk mencapai dan mengembangkan kapasitas kolektif perempuan dan memberdayakan mereka untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat desa maupun nasional yang mendukung pencapaian RPJMN dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam upaya meningkatkan akses perempuan miskin terhadap layanan dan program pemerintah yang mendasar.

Program pemberian bantuan ini tidak hanya memberikan dampak pada level negara melainkan karena adanya desentralisasi pemerintah lokal semakin diharapkan untuk memberikan layanan sosial bagi masyarakat miskin meskipun kapasitas umumnya lemah namun dengan adanya bantuan ini selain memberikan dampak langsung bagi masyarakat dalam mencapai perbaikan akses dan mata pencaharian bagi perempuan miskin di Indonesia untuk membangun jaringan yang

berbasis luas dan koalisi inklusif yang dipimpin oleh penguatan organisasi perempuan dan yang berkepentingan gender, dan para anggota parlemen untuk mempengaruhi kebijakan, peraturan dan jasa, dan di berbagai sektor swasta yang dipilih, untuk meningkatkan akses perempuan miskin pada layanan penting. Dengan dibentuknya mitra lokal diharapkan mampu memalstikan masyarakat miskin terutama perempuan dapat menerima agenda dari desentralisasi Pemerintahan Indonesia. Australian Aid berkomitmen untuk bekerjasama dengan berbagai elemen baik itu pusat daerah maupun mitra lokal dalam memperbaiki tatakelola serta pelayanan lokal dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja dalam upaya pembangunan ekonomi daerah terpencil dan layanan pemberian bantuan bagi kelompok terpinggirkan dan memperkuat kepemimpinan perempuan di daerah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam hubungan internasional saat ini isu-isu low politik yang lebih banyak menghiasi tatanan internasional dimana isu keamanan bukan lagi yang banyak di soroti melainkan isu-isu seperti Ekonomi, HAM, kemiskinan, lingkungan dan Gender. Dengan adanya transformasi dalam tatanan internasional sehingga memberikan kesempatan bagi aktor domestik dalam melakukan interaksi maupun kerjasama dalam lintas batas negara meskipun organisasi internasional berkembang pesat namun negara tetap menjadi aktor yang dominan dalam kerjasama internasional

Untuk memperkuat posisi suatu negara di kancah internasional yaitu salah satunya dengan melakukan kerjasama dan menciptakan ketergantungan satu sama lain. Kerjasama juga merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh suatu negara untuk meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara dalam upaya mencapai kepentingan nasionalnya dimana kerjasama yang biasa dilakukan sebaiknya dilandasi rasa saling percaya, perjanjian internasional menghargai dan menghormati kedaulatan suatu negara baik itu kerjasama dibidang politik, ekonomi, pendidikan, keamanan maupun budaya.

Dalam kerjasama internasional tidak luput dengan bantuan asing. Bantuan asing merupakan salah satu instrumen yang digunakan aktor internasional baik itu berupa uang, jasa, barang, nda atau bantuan teknis dari negara pendonor ke negara penerima untuk mencapai kebijakan luar negeri.

Australian Aid sendiri telah memberikan bantuan asing terhadap Indonesia melalui program MAMPU yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin, kesetaraan gender serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia dan untuk mencapai tujuan SDGs. Bantuan Australia sendiri juga di latar belakang oleh kepentingan negaranya dimana Australia melihat peluang dan potensi yang besar terhadap Indonesia dalam berinvestasi dan merupakan salah satu pasar terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Adapun program kerjasama yang dilakukan Australian Aid sendiri dengan menggandeng salah satu mitra lokal yaitu KPKPST salah satu LSM lokal di Donggala Sulawesi Tengah. Tingginya angka kekerasan dan kurangnya peran perempuan dalam masyarakat dan akses perempuan terhadap layanan dasar menginisiasi kerjasama ini. Adapun implementasi dari kerjasama Australian Aid dengan mitra lokal yaitu dengan memberikan advokasi dan pendampingan terhadap korban kekerasan, membentuk posko pengaduan dan memberikan informasi dan pemahaman terkait partisipasi perempuan, kesetaraan gender dan membantu masyarakat dalam mengakses layanan dasar diharapkan dengan adanya kerjasama dengan mitra lokal diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap para pengambil kebijakan dan memberikan informasi dalam meningkatkan tatakelola pemerintahan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Setidaknya dengan adanya program kerjasama ini dimana beberapa masyarakat yang sudah menerima dampak kerjasama ini seperti penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan, pelatihan dan sosialisasi terkait kekerasan, pendirian posko pengaduan di tiga tempat, meningkatnya minat masyarakat dengan mengajukan diri sebagai kader

posko dan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang ingin mengakses layanan kesehatan.

B. SARAN

Adapun saran dari penulis yaitu :

1. Dalam kerjasama Australian Aid dengan mitra lokal lebih di perluas cakupannya dimana posko pengaduan lebih di perbanyak sehingga masyarakat pinggiran lebih mudah mengaksesnya karena apabila tempat pengaduan relatif jauh membuat beberapa masyarakat enggan untuk berkonsultasi.
2. Sistem penyimpanan data laporan terkait kerjasama program karena belajar dari pengalaman yang lalu akibat bencana alam yang terjadi banyak data laporan yang hilang sehingga peneliti minim informasi

Daftar Pustaka

Buku

- Dougherty, James E. dan Robert L. Pfaltz graff Jr., 1986, *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*, New York: Longman.
- Forum Pengada Layanan 2017 , *Layanan berbasis komunitas*, Bandung: SAPA
- Institut Kuntjara, Esther 2003 *Gender bahasa dan kekuasaan*, Jakarta: Libri Yembise
- Giplin, Robert, 1987, *The Issue of Dependency and Economid Development dalam The Political Economy of International Relations*, Princeton: Princeton University Press.
- Goldstein, Joshua dan Jon Pevenhouse, 2009, *International Relations*, 8th Edition, New York: Pearson
- Keeley Brian 20011, *From Aid To Development the Global Fight against Poverty*, Paris, France OECD
- Kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 2017 *Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta :
- kementrian pemberdayaan perempuan dan anak
- Komnas perempuan 2018, *Membangun Akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan*, jakarta pusat : Komnas Perempuan
- Komnas Perempuan, 2018 *System perdilan perempuan* , Jakarta : komnas perempuan

Moore Dane 2018, Australian Aid Soft Power Asset , Australian World vision
world vision

Internet

Komnas perempuan 2019, *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan*

2016 – KOMNAS PEREMPUAN. diakses 15 Agustus 2019 dari

[https://www.komnasperempuan.go.id/-catatan-tahunan-tentang-](https://www.komnasperempuan.go.id/-catatan-tahunan-tentang-kekerasan—terhadap-perempuan-2016)

[kekerasan—terhadap-perempuan-2016](https://www.komnasperempuan.go.id/-catatan-tahunan-tentang-kekerasan—terhadap-perempuan-2016)

Tribun Palu 2019, Disulteng, terjadi sebanyak 152 tindak kekerasan pada

perempuan dan anak, diakses 16 Agustus 2019 dari

[https://www.google.com/amp/s/palu.tribunnews.com/amp/2019/07/23/di-](https://www.google.com/amp/s/palu.tribunnews.com/amp/2019/07/23/di-sulteng-terjadi-sebanyak-152-tindak-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak)

[sulteng-terjadi-sebanyak-152-tindak-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak](https://www.google.com/amp/s/palu.tribunnews.com/amp/2019/07/23/di-sulteng-terjadi-sebanyak-152-tindak-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak)

BPS.go 2018 diakses 28 februari 2020 [https://sulteng.](https://sulteng.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3)

[bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3](https://sulteng.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3)

MAMPU 2012, Kemitraan Australia-indonesia untuk kesetaraan Gender dan

pemberdayaan perempuan diakses 20 februari 2020 <https://www.mampu.or.id/>

Kedubes Australia Indonesia <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesia>

[n/cooperation-programs.html](https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesia) diakses 21 februari 2020

Jurnal

Badan Pusat Statistik 2018 Indikator kesejahteraan Rakyat , Sulawesi Tengah

Badan pusat statistic

Pamungkas catur Hardhana 2018, *Peran AUSAID melalui program mampu dalam*

pemberdayaan perempuan di Indonesia, FISIP univ.Mulawarman

Sahi Irawati 2015, *Potret situasi perempuan wilayah rentan diskriminasi dan kekerasan di Sulawesi Tengah*, Sulawesi Tengah : Badan pemberdayaan

perempuan dan keluarga berencana Provinsi Sulawesi Tengah

Milner Helen 2012, *International Theories of Cooperation among Nations*, Cambridge University Press

Hayati Mala, 2005 *Hukum Organisasi Internasional*, Kapita Selekta Hukum Internasional

Dinkes Donggala 2018, *Profil Kesehatan Kabupaten Donggala* Donggala : Dinas Kesehatan

Australian Government 2012 *Empowering Indonesian Women for Poverty Reduction*

BOSUWA